



SEJARAH KABUPATEN BANTUL



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penulisan Buku Sejarah Kabupaten Bantul. Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang sudah berusia ratusan tahun. Keberadaannya dimulai sejak masa kerajaan Mataram Islam sekitar abad 19. Berbagai peristiwa sejarah banyak terjadi di Kabupaten Bantul, baik dari masa kerajaan, kolonial, kemerdekaan, maupun reformasi. Peninggalan-peninggalan bersejarah di seluruh wilayah Kabupaten Bantul ada yang masih bisa diketahui dan dapat dijadikan tambahan wawasan bagi masyarakat umum.

Penerbitan buku ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melalui Bidang Sejarah, Bahasa, dan Sastra berupaya untuk mendokumentasikan Sejarah Kabupaten Bantul termasuk perkembangannya sampai saat ini, agar sejarah lokal dapat diketahui dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dan masyarakat pada umumnya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku Sejarah Kabupaten Bantul. Untuk itu, kami menerima saran dan kritik yang membangun sehingga dapat melengkapi buku ini. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan tentang sejarah lokal yang ada di Kabupaten Bantul khususnya tentang Sejarah Kabupaten Bantul, serta dapat dijadikan referensi bagi para pihak yang akan melakukan kajian lebih lanjut tentang sejarah Kabupaten Bantul.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bantul, Desember 2019

Kepala Dinas



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos., M.M.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19711230 199101 1 001



SAMBUTAN BUPATI BANTUL



Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita, sehingga buku Sejarah Kabupaten Bantul dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyambut baik adanya Buku Sejarah Kabupaten Bantul ini, karena kita semua dapat melakukan refleksi peran serta kita dalam perkembangan sejarah yang ada di Kabupaten Bantul.

Berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Kabupaten Bantul dapat menjadi dasar untuk penanaman nilai-nilai kejuangan, kebangsaan, serta kepahlawanan kepada generasi muda maupun masyarakat umum. Melalui buku ini semoga dapat memberikan inspirasi kepada generasi muda dan masyarakat umum untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah di Kabupaten Bantul untuk membangun Kabupaten Bantul menuju Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.





Buku ini juga dapat menjadi acuan dalam pengenalan, maupun penanaman nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan serta kepahlawanan. Akhir kata semoga Buku Sejarah Kabupaten Bantul dapat bermanfaat bagi Kabupaten Bantul sesuai visi dan misi bersama dan banyak buku sejarah yang dapat diterbitkan untuk mendukung serta mendokumentasikan peristiwa sejarah yang terjadi di Kabupaten Bantul.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bantul, Desember 2019
Bupati Bantul

Drs. H. Suharsono





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN BUPATI BANTUL.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Bantul	2
BAB 2. SEJARAH LAHIRNYA KABUPATEN BANTUL	3
2.1 Sejarah Perkembangan Administrasi Desa / Kecamatan.....	5
2.2 Bupati Kabupaten Bantul 1831-1942	6
2.3 Dinamika Ekonomi Bantul Tahun 1831-1942	8
2.4 Perkembangan Pendidikan Bantul Tahun 1831-1942	11
BAB 3. BANTUL ZAMAN JEPANG, REVOLUSI & ORDE LAMA	
TAHUN 1942-1966	14
3.1 Bantul Zaman Pendudukan Jepang	14
3.2 Bupati Kabupaten Bantul 1942-1966	15
3.3 Dinamika Politik Bantul 1942-1966	20
3.4 Dinamika Ekonomi Bantul 1942-1966.....	21
3.5 Dinamika Sosial Budaya Bantul 1942-1966.....	22
BAB 4. BANTUL ZAMAN ORDE BARU & REFORMASI TAHUN 1967-	
2016.....	24
4.1 Bantul Zaman Orde Baru Dan Reformasi.....	24
4.2 Bupati Kabupaten Bantul 1966-2016	25





BAB 5. TOPONIMI KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL	34
5.1 Kecamatan Dlingo.....	34
5.2 Kecamatan Jetis	37
5.3 Kecamatan Pundong.....	40
5.4 Kecamatan Srandakan	44
5.5 Kecamatan Kretek.....	47
5.6 Kecamatan Pandak.....	51
5.7 Kecamatan Sanden.....	55
5.8 Kecamatan Pajangan	58
5.9 Kecamatan Imogiri.....	61
5.10 Kecamatan Piyungan.....	65
5.11 Kecamatan Pleret	68
5.12 Kecamatan Kasihan.....	71
5.13 Kecamatan Sewon	74
5.14 Kecamatan Banguntapan	77
5.15 Kecamatan Sedayu	81
5.16 Kecamatan Bambanglipuro	84
BAB 6. PENUTUP.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90





DAFTAR GAMBAR

- gambar 2.1. Dusun Bantulkarang Merupakan Awal Kabupaten Bantul 3
- Gambar 2.2. Foto Bapak H. Purwoharjono Salah Satu Cucu Djogowijoyo, Tentaranya Pangeran Diponegoro Yang Diperintahkan Untuk Menunggu Pesanggarahan Di Tanah Perdikan Bantulkarang. 7
- Gambar 2.3. Peta Sebaran Pabrik Gula (Suikerfabrieken) Di Karesidenan Djogjakarta Tahun 1926. Dari 18 Pabrik Gula, 9 Diantaranya Berada Di Bantul..... 9
- Gambar 2.4. Bendungan Kamijoro Yang Diresmikan Oleh Peresmian Bendungan Kamijoro Oleh Hamengku Buwana VIII Dan Residen P.W. Jonquier Pada Tanggal 28 Februari 1924, Yang Saat Ini Masih Berfungsi Dengan Baik. 10
- Gambar 2.5. Bendungan Mejing Yang Terletak Di Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul..... 11
- Gambar 2.6. Gejlik Pitu Yang Terletak Di Kecamatan Sanden, Bantul. 11
- Gambar 3.1. Salah Satu Gua Jepang Di Kawasan Pundong, Bantul Yang Berfungsi Untuk Pengintaian Dan Perlindungan Pasukan. Pembangunan Gua Ini Melibatkan Romusha Asal Bantul. 14
- Gambar 3.2. Panitia Pemilu Tahun 1951 Menggunakan *Bumbung* Sebagai Tempat Suara. 16
- Gambar 3.3. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (Bp4), Saat Ini Berubah Nama Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Respira, Terletak Di Palbapang Bantul. 17
- Gambar 3.4. Pak Wardoyo, Anak Ke-4 Bupati Bantul 1958-1960 Slamet Setyosudarmo Saat Berdiri Di Atas Puing Rumah Orang Tuanya Di Gedangan Pundong Bantul Yang Rata Dengan Tanah Akibat Gempa Mei 2006. 19
- Gambar 3.5. Monumen Prasasti Bibis, Desa Segoroyoso, Pleret. 21





Gambar 3.6. Monumen Prasasti Bibis Di Dusun Bibis, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan.	21
Gambar 4.1. Monumen Apsari Di Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.	24
Gambar 4.2. Bupati R. Soetomo Mangkusasmito, Sh.	25
Gambar 4.3. Gambaran Keindahan Pantai Samas Bantul.....	26
Gambar 4.4. Bupati Suheram Partosuputro.	27
Gambar 4.5. Peresmian Kampus Isi Yogyakarta Oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto Tahun 1985.....	28
Gambar 4.6. Bupati Moerwanto Suprpto.	28
Gambar 4.7. Foto Bupati Sri Roso Sudarmo.	30
Gambar 4.8. Pendopo Parasanya. Sumber Foto: Tim Peneliti 2019	30
Gambar 4.9. Salah Satu Kerajinan Patuh Primitif (Asmat) Di Pucung Bantul.	31
Gambar 4.10. Bupati Drs. Idham Samawi, Wakil Bupati Sumarno (2005-2010) Beserta Istri.....	32
Gambar 4.11. Keindahan Wisata Puncak Becici.	33
Gambar 5.1. Kantor Kecamatan Dlingo	34
Gambar 5.2. Kantor Kecamatan Jetis.....	37
Gambar 5.3. Kantor Kecamatan Pundong	40
Gambar 5.4. Kantor Kecamatan Srandakan.....	44
Gambar 5.5. Kantor Kecamatan Kretek	47
Gambar 5.6. Jembatan Kretek.....	49
Gambar 5.7. Kantor Kecamatan Pandak.....	51





Gambar 5.8. Kantor Kecamatan Sanden	55
Gambar 5.9. Kantor Kecamatan Pajangan	58
Gambar 5.10. Kantor Kecamatan Imogiri	61
Gambar 5.11. Komplek Makam Imogiri	64
Gambar 5.12. Kantor Kecamatan Piyungan	65
Gambar 5.13. Kantor Kecamatan Pleret.....	68
Gambar 5.14. Kantor Kecamatan Kasihan	71
Gambar 5.15. Kantor Kecamatan Sewon	74
Gambar 5.16. Kantor Kecamatan Banguntapan	77
Gambar 5.17. Kantor Kecamatan Sedayu	81
Gambar 5.18. Kantor Kecamatan Bambanglipuro	84
Gambar 5.19. Pengumuman Pergantian Nama Kapanewon Panggang Menjadi Kapanewon Bambanglipur.....	84



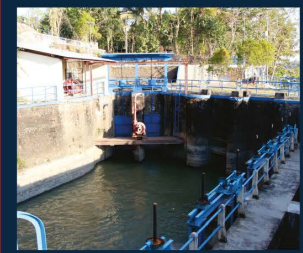


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Bupati Kabupaten Bantul Tahun 1831 Sampai 2016	4
Tabel 2.2. Pembagian Wilayah Distrik Dan Desa Di Kabupaten Bantul.	5
Tabel 5.1. Daftar Desa dan Dusun Di Kecamatan Dlingo	34
Tabel 5.2. Daftar Desa dan Dukuh di Kecamatan Jetis.....	38
Tabel 5.3. Daftar Desa Dan Dusun di Kecamatan Pundong	40
Tabel 5.4. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Srandakan	45
Tabel 5.5. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Kretek.....	48
Tabel 5.6. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Pandak.....	52
Tabel 5.7. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Sanden.....	55
Tabel 5.8. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Pajangan	58
Tabel 5.9. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Imogiri.....	61
Tabel 5.10. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Piyungan	66
Tabel 5.11. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Pleret	69
Tabel 1.13. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Kasihan.....	72
Tabel 5.13. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Sewon	75
Tabel 5.14. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Banguntapan	78
Tabel 5.15. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Sedayu	81
Tabel 5.16. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Bambanglipuro	85



BAB 1 PENDAHULUAN





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bantul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki latar belakang historis yang sangat panjang, bukan hanya di masa setelah kemerdekaan, tetapi juga pada masa Kerajaan dan Kolonial. Bantul lahir dan berkembang sebagai sebuah wilayah administratif karena adanya campur tangan pemerintah kolonial. Meskipun pada awalnya Kabupaten Bantul lahir dengan nama yang berbeda, yaitu Kabupaten Bantulkarang.

Kuntowijoyo sendiri menyebutkan: “Dapat dikatakan, bahwa pada awal abad ke-20 kota lahir sebagai suatu kategori dalam sejarah Indonesia. Kota dapat disebut sebagai sebuah kesatuan yang secara sah berdiri sendiri dan patut menjadi bidang kajian yang tersendiri pula”. Oleh sebab itu penulisan ini merekonstruksi perjalanan sejarah sebuah kota atau Kabupaten khususnya Kabupaten Bantul yang dahulunya merupakan Kabupaten Bantulkarang. Sejarah dapat dilihat sebagai catatan atau rekaman peristiwa daripada peristiwa itu sendiri.

Mengenai sejarah pembentukan Kabupaten Bantul, Pemerintah Hindia Belanda dan Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Seorang nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengku Buwana V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasar pada *Usamu Seirei* Nomor 13, sedangkan *'stadsgementie ordonantie'* dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945. Akan tetapi, di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-undang Pokok Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah dan selanjutnya mengacu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Sejarah Kabupaten Bantul perlu didokumentasikan untuk keperluan pengenalan Kabupaten Bantul bagi warga Bantul sendiri maupun masyarakat di luar Kabupaten Bantul. Kajian sejarah tersebut akan lebih bermakna apabila memadukan berbagai teori, sehingga sejarah akan lebih kaya wawasan. Kajian sejarah mengenai Kabupaten Bantul dapat digunakan untuk membangun jiwa kebangsaan, nasionalisme, penanda jati diri bangsa, dan sumber ilmu pengetahuan.



1.2 Gambaran Umum Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari 5 Kabupaten/Kota di Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km² (15,90 % dari luas wilayah DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 40% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur.

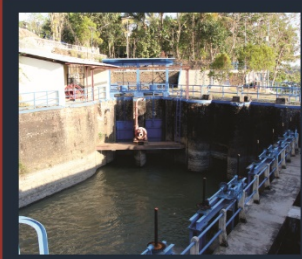
Secara garis besar terdiri dari: Bagian Barat, merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %). Bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengan kemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggran dan Wonosari. Bagian Selatan terdapat gisik dan gumuk-gumuk pasir (fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal dan sedikit laguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Batas-batas wilayah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul & Kabupaten Sleman; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo; dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². yaitu: Sungai Oya: 35,75 km; Sungai Opak: 19,00 km; Sungai Code: 7,00 km; Sungai Winongo: 18,75 km; Sungai Bedog: 9,50 km; Sungai Progo: 24,00 km.

Dilihat dari latar pemandangan alamnya (*landscape*) daerah Bantul memiliki daya pikat sendiri. Letaknya yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia membuat Bantul memiliki kondisi alam yang berbeda. *Sandunes* (gumuk pasir) yang terdapat di bagian selatan Kabupaten Bantul merupakan kondisi alam yang khas dan menarik. Demikian pula perbukitan kapur yang berada di tenggara dan barat daya Bantul, ikut mempercantik pemandangan alam kawasan ini karena perbukitan itu seolah-olah menjadi pagar bagi kehidupan di atas dataran subur.

BAB 2

Sejarah Lahirnya Kab. Bantul



BAB 2. SEJARAH LAHIRNYA KABUPATEN BANTUL

Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi menetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama **Raden Tumenggung Mangun Negoro** kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengku Buwana V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. Secara resmi berdirinya Kabupaten Bantul pada tanggal **20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa)**, diikuti berbagai perkembangan dalam bidang administrasi pemerintahan, bidang perekonomian, perubahan sosial masyarakat, dan lain-lain. Perubahan pertama dan terpenting adalah daerah Bantul menjadi satu wilayah yang secara tersendiri diurus oleh seorang kepala pemerintahan dan tidak diurus lagi oleh istana kasultanan.



Gambar 2.1. Dusun Bantulkarang Dulu Merupakan Awal Kabupaten Bantul
Sumber Foto : Tim Peneliti 2019

Sejak itu Kabupaten Bantul berjalan dari masa ke masa mengikuti perkembangan sejarahnya bersama-sama dengan gerak dinamika masyarakatnya. Pimpinan silih berganti menangani dan memimpin Kabupaten Bantul sejak tahun 1831. Berdasarkan sumber-sumber yang dapat dikumpulkan berikut daftar bupati Kabupaten Bantul dari pertama berdiri tahun 1831 sampai tahun 2016.

Tabel 2.1. Daftar Bupati Kabupaten Bantul tahun 1831 sampai 2016

No	Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat
1.	Raden Tumenggung Mangun Negoro	1831	1845
2.	Raden Tumenggung Jayadiningrat	1845	1851
3.	Raden Tumenggung Tirtonegara	1851	1852
4.	Raden Tumenggung Nitinegara	1852	1855
5.	Raden Tumenggung Danokusuma	1855	1878
6.	Raden Tumenggung Djojowinoto	1878	-
7.	Raden Tumenggung Djojodipuro	-	-
8.	Raden Tumenggung Surjukusumo	-	-
9.	Raden Tumenggung Mangunyudho	1899	1913
10.	K.R.T. Purbadiningrat	1913	1918
11.	K.R.T. Dirdjokusumo	1918	1943
12.	K.R.T. Djojodiningrat	1943	1947
Pemerintahan RI			
13.	K.R.T. Tirtodiningrat	1947	1951
14.	K.R.T. Purwaningrat	1951	1955
15.	K.R.T. Brataningrat	1955	1958
16.	K.R.T. Wiraningrat	1958	Meninggal
17.	Slamet Setyosudarmo	1958	1960
18.	K.R.T. Sosrodiningrat	1960	1969
19.	K.R.T. Prodjohardjono (Penjabat bupati)	1969	1970
20.	R. Soetomo Mangkusasmito, SH.	1970	1980
21.	Suheram Partosaputro	1980	1985
22.	Moerwanto Suprpto (K.R.T. Suryo Padmo Hadiningrat)	1986	1991
23.	Sri Roso Sudarmo (K.R.T. Yudadiningrat)	1991	1998
24.	Drs. H. Kismosukirdo (Penjabat bupati)	1998	1999
25.	Drs. HM. Idham Samawi	1999	2004
26.	Drs. Mujono NA (Penjabat bupati)	Des 2004	Jan 2005 ¹
27.	Ir. Soetaryo (Penjabat bupati)	2005	2005
28.	Drs. HM. Idham Samawi (Terpilih kembali melalui pilkada)	2005	2010
29.	Hj. Sri Surya Widati	2010	2015
30.	Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM (Penjabat bupati)	2015	2016
31.	Drs. H. Suharsono	2016	sekarang

Sumber: Djoko Suryo et al., 2007: 40-41. Dengan update informasi saat ini.

¹ Drs. Mujono NA hanya menjalankan tugasnya sebagai Penjabat Bupati Bantul selama 40 hari, karena meninggal dunia. Selanjutnya digantikan oleh Ir. Soetaryo sebagai penjabat bupati.



Tahun 1831 setelah Kabupaten Bantul berdiri, struktur pemerintahan di bawah Bupati masih berupa Kademangan, namun istilahnya diubah menjadi distrik sesuai dengan arahan dari Pemerintahan Belanda. Tahun 1868, Kabupaten Bantul terdiri dari 13 distrik dengan masing-masing membawahi desa-desa. Kemudian pada tahun 1878 terjadi reorganisasi wilayah distrik dari semula 13 menjadi 8 distrik saja. Kemudian pada tahun 1900 jumlahnya berubah lagi menjadi 7 distrik karena Pasar Gede tidak ada dan belum ada informasi apakah melebur ke distrik lain atau bagaimana. Ketujuh distrik pada tahun 1900 tersebut antara lain: Kretek, Srandakan, Sewon, Cepit, Pandak, Panggang, dan Sanden. Keterangan sejarah yang berbeda dapat disimak dalam Rouffaer (1988).

2.1 Sejarah Perkembangan Administrasi Desa / Kecamatan

Wilayah Djogjakarta (Ngayogyakarta) pada tahun 1870 terbagi menjadi 8 *regentschappen* (kabupaten) yaitu Bantul, Kalasan, Sleman, Nanggoelan, Kalibawang, Sentolo, Pengasih, dan Gunungkidul. Pada tahun itu, Bupati Bantul yang menjabat adalah Raden Tumenggung Danoe Kesoemo, dan memiliki 13 Distrik dengan total jumlah desa sangat besar sekali yaitu 641 desa (Sumber: Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie. Batavia: Lands-Drukkerij. 1871: 170)

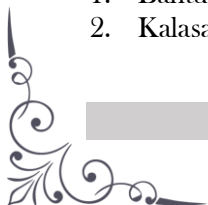
Tabel 2.2. Pembagian wilayah distrik dan desa di Kabupaten Bantul.

1868		1878		1990
Distrik: 13	Desa	Distrik: 8	Desa	Distrik: 7
1. Celep	33	1. Pasar Gede	60	1. Kretek
2. Samin	37	2. Kretek	101	2. Srandakan
3. Dungkus	48	3. Srandakan	126	3. Sewon
4. Pucangan	58	4. Sewon	118	4. Cepit
5. Panggang	56	5. Cepit	117	5. Pandak
6. Lipuro	46	6. Pandak	226	6. Panggang
7. Cepit	60	7. Panggang	137	7. Canden
8. Soka	39	8. Canden	120	
9. Pekoja	96			
10. Kretek (g)	50			
11. Kuwarasan	48			
12. Gabusan	50			
13. Pandes	38			

Sumber: Suryo 2007:44 dan Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie. Batavia: Lands-Drukkerij. 1871:170.

Pada tahun 1870, Nama-nama Bupati di wilayah *vorstenlanden* Yogyakarta antara lain:

1. Bantul. Raden Tumenggung Danoe Kesoemo
2. Kalasan. Raden Tumenggung Padmo Negoro



3. Sleman. Raden Tumenggung Kesoemo Redjo
4. Nanggulan. Raden Rio Merto Dipoeoro
5. Kali-bawang. Raden Rio Joedo Prawiro
6. Sentolo. Raden Rio Joedo Diningrat
7. Pengasih. Raden Rio Soemo Negoro
8. Gumungkidul. Raden Tumenggung Mangoen Negoro

Pemerintah kabupaten Bantul menyusun penataan wilayah-wilayah bekas *enclave* Surakarta dan diajukan ke pemerintah provinsi sehingga ditetapkan melalui Perda DIY 1/1958 tentang Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung, dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul. Berikut ini rinciannya:

- Kapanewon IMOGIRI meliputi daerah-daerah kelurahan: Selopamioro, Srihardjo, Wukirsari, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, dan Giriredjo.
- Kapanewon DLINGO meliputi daerah-daerah kelurahan: Dlingo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Djatimuljo, dan Terong.
- Kapanewon PLERET meliputi daerah-daerah kelurahan: Wonokromo, Pleret, Segorojoso, Bawuran, dan Wonolelo.
- Kapanewon BANGUNTAPAN (Baturetno) meliputi daerah-daerah kelurahan: Tamanan, Wirokerten, Djambidan, Potorono, Baturetno, Banguntapan, Singosaren, dan Djagalan.

Dengan penataan daerah bekas *enclave* tersebut, wilayah Bantul menjadi bertambah luas dan pembagian pemerintahannya bertahan sampai sekarang, yaitu dengan terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, 933 dusun dengan luas 504,47 km² (Purwanta *et al.*, 2015: 28-31).

2.2 Bupati Kabupaten Bantul 1831-1942

Sejak Kabupaten Bantul didirikan tahun 1831—akibat restrukturisasi pemerintah pasca Perang Jawa—hingga runtuhnya Hindia Belanda tahun 1942, silih berganti para bupati memimpin wilayah ini. Tidak banyak sumber sejarah mengulas secara detail masing-masing Bupati Bantul pada periode kolonial Belanda ini. Berikut ini daftar Bupati Bantul pada periode tersebut: *Pertama*, Raden Tumenggung Mangun Negoro (1831-1845); *Kedua*, Raden Tumenggung Joyadiningrat (1845-1851); *Ketiga*, Raden Tumenggung Tirtonegara (1851-1852); *Keempat*, Raden Tumenggung Nitinegara (1852-1855); *Kelima*, Raden Tumenggung Danukusuma (1855-1878); *Keenam*, Tumenggung Djojowinoto (1878-..); *Ketujuh*, Raden Tumenggung Djojodipuro; *Kedelapan*, Raden Tumenggung Surjokusumo; *Kesembilan*, Raden Tumenggung Mangunyudo (1899-1913); *Kesepuluh*, KRT Purbadiningrat (1913-1918); dan *Kesebelas*, KRT Dirdjokusumo (1918-1943).

- **Raden Tumenggung Mangun Negoro**

Raden Tumenggung Mangun Negoro merupakan Bupati Bantul pertama, beliau memerintah cukup lama yakni 14 tahun sejak Kabupaten ini didirikan tahun 1831. Beliau merupakan memantu dari anak 13 Sultan Hamengku Buwana III. Tugas beliau memerintah cukup berat yaitu melakukan penataan pemerintah baik dalam birokrasi internal pemerintahan kabupaten maupun dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Tentu saja, beliau juga bertanggungjawab terhadap keamanan wilayah pasca Perang Jawa.

- **Raden Tumenggung Joyodiningrat**

Beliau memerintah Bantul selama 6 tahun, tetapi akhir pemerintahannya diwarnai dengan tragedi bunuh diri. Bupati selanjutnya yang menjabat setelah RT Jayadiningrat adalah **RT Tirtonegoro, RT Nitinegoro, RT Danukusuma, RT Djojowinoto, dan RT Surjokusumo**. Untuk kelima bupati ini, tidak banyak ditemukan arsip baik koran zaman tersebut maupun manuskrip yang menjelaskan tentang spesifik ketiga bupati tersebut. Kecuali salah satu arsip Belanda menyebutkan bahwa RT Nitinegoro tak lain merupakan salah satu putra dari Sultan Hamengku Buwana IV.



Gambar 2.2. Foto Bapak H. Purwoharjono salah satu cucu Djogowijoyo, tentaranya Pangeran Diponegoro yang diperintahkan untuk menunggu Pesanggarahan di Tanah Perdikan Bantulkarang. Berfoto bersama tombak-tombak peninggalan kakeknya dari awal Abad XIX. Sumber Foto: H. Ismanto Purwo, Desember 2019

- **Raden Tumenggung Djojodipoero**

Bupati ketujuh yang bernama RT Djojodipoero memiliki dua kisah menarik yang diliput oleh koran pada saat itu. Pada awal abad XIX ada satu lembaga bernama Java Instituut, suatu lembaga yang dibentuk untuk menjadi lembaga ilmiah di Hindia Belanda. Dalam kongres Java Instituut di Bandung tanggal 17-19 Juni 1921, terdapat salah satu kontingen musik Jawa yang ikut dalam kongres, yang tak lain merupakan bimbingan dari RT Djojodipoero. Setelah tidak menjadi Bupati Bantul, RT Djojodipoero, memang terlibat aktif dalam organisasi ilmiah pertama di Hindia Belanda itu. Gerak langkah Java Instituut antara lain di bidang penelitian dan pengembangan budaya, termasuk seni dan sejarah (*De Indische Courant* 24 Maret 1930).

- **Raden Tumenggung Mangunyudho**

Bupati Bantul kesembilan, RT Mangunyudho (1899-1913) memiliki kisah tersendiri dalam menyelesaikan konflik di masyarakat khususnya dalam hal pertanahan. Pada masa kepemimpinan beliau, pernah ada kasus sengketa tanah di Desa Pathen Distrik Srandakaan Regentschap atau Kabupaten Bantul Yogyakarta (van Bevernoorde 1903:162-163). Raden Tumenggung Mangunyudho memerintah Kabupaten Bantul selama 14 tahun sejak 1899 sampai 1913. Raden Tumenggung Mangunyudho meninggal dan dimakamkan di Sleman. Sedangkan Bupati kesepuluh yaitu **KRT Purbadinigrat (1913-1918)**. Sayang sekali tidak ada informasi apapun yang berkaitan dengan pemerintahan beliau.

- **KRT Dirdjokoesoemo**

KRT Dirdjokoesoemo adalah Bupati Bantul kesebelas beliau memerintah Bantul cukup lama yaitu antara 1918 sampai 1943. Koran *Het Nieuws van den dag voor nedh-indie*, 30 Agustus 1939 halaman 2, serta koran *De Indische courant* menyebutkan bahwa Bupati Bantul bernama Raden Toemenggoeng Dirdjokoesoemo memperoleh penghargaan *Groote Goulden Ster* atau Bintang Emas Besar dari Ratu Wilhelmina Belanda karena sang Ratu sedang ulang tahun. Penyerahan dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jakarta waktu itu.

2.3 Dinamika Ekonomi Bantul Tahun 1831-1942

Kebijakan Tanam Paksa (1830-1870) yang diberlakukan di wilayah Gubernemen (luar *vorstenlanden*) dan masif di Jawa tidak berlaku di daerah *vorstenlanden* seperti Yogyakarta. Kebijakan itu masif diberlakukan di daerah-daerah luar *vorstenlanden* dengan menanamkan tanah-tanah petani dan juga tanah hutan—yang seketika dibuka—dengan tanaman ekspor seperti kopi, indigo, tebu, dan tembakau. Di daerah *vorstenlanden* memang tidak diberlakukan sistem tanam paksa (*kulturstelsel*), namun tidak berarti sistem ekonomi kapitalis tidak

diperkenalkan. Swasta asing menyewa tanah lungguh atau apanage para bangsawan atau aristokrat untuk membuka areal penanaman tanaman komersial. Penanaman modal itu meningkat terutama sejak 1870an, di mana muncul kebijakan liberalisasi ekonomi dengan mendatangkan pemodal asing (Djoko Suryo *et al.*, 2007: 46 dan komunikasi pribadi).

Usaha pembukaan perkebunan tersebut dilakukan melalui kontrak antara pengusaha atau pemilik modal dengan pemilik tanah. Sementara itu di luar Yogyakarta, kontrak dilakukan oleh swasta asing dengan penduduk perdesaan melalui kepala desa dan bupati. Pada dekade kedua abad ke-20, di Bantul terdapat lima perusahaan yang menyewa tanah untuk perkebunan Tebu antara lain: 1) NV. Cultuur Maatschappij Bantoei; 2) NV. Cultuur Maatschappij Gesiekan en Magoewo (Gesiekan); 3) NV. Cultuur Maatschappij Gondanglipero; 4) NV. Poendoeng; dan 5) NV. Poendoeng Siloek Lanteng (Margana *et al.*, 2013: 5-6).



Gambar 2.3. Peta sebaran Pabrik Gula (Suikerfabrieken) di Karesidenan Djokjakarta tahun 1926. Dari 18 Pabrik gula, 9 diantaranya berada di Bantul. *Sumber Peta: Leiden University Library*

Di Bantul, ketika tanah *lungguh*³ disewa selama 30 tahun, buruh tani tidak terlibat dalam kontrak. Petani tetap menjadi penggarap tanah tersebut dengan status sebagai tenaga kerja buruh. Dalam situasi ini, hubungan antara petani buruh dengan tanah apanage berubah. Semula, para petani buruh mengerjakan tanah *lungguh* dengan memberikan penyerahan kepada pemilik tanah setelah panen, tetapi tanah tersebut disewakan oleh pemiliknya kepada pengusaha swasta dengan

³ *lungguh*/lung-guh/ ark n tanah garapan yang diberikan kepada pegawai kerajaan sebagai pengganti gaji sesuai dengan kedudukannya (jabatannya) lihat <https://kbbi.web.id/lungguh-2>

kontrak, maka petani buruh tersebut menjadi buruh tani di lahan tersebut dengan sistem upah kerja.

Mayoritas investasi swasta asing yang berlangsung di Bantul pada akhir abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 adalah investasi pabrik pengolahan tebu. Pemerintah memonopoli penanaman tebu, kemudian tebu tersebut dimasukkan ke pabrik gula yang didirikan oleh swasta asing. Jadi jelas bahwa swasta asing masuk di Bantul pada awal periode liberalisasi ekonomi dalam bentuk pendirian pabrik gula. Sehingga wajar, bahwa di daerah *vorstenlanden* tidak ada bekas HGU¹ yaitu perkebunan milik swasta, seperti yang terjadi di daerah gubernemen. Pabrik yang ada hanya pabrik-pabrik pengolahan tebu/gula yang didirikan oleh swasta asing. Pabrik gula pertama yang didirikan di wilayah Yogyakarta adalah PG Gondanglipoero yang berlokasi di Gajuran, Kabupaten Bantul tahun 1862. Sedangkan pendirian terakhir pabrik gula di Yogyakarta yaitu PG Sendangpitoe yang berlokasi di Minggir Sleman tahun 1922. Pada 1909, di Yogyakarta telah berdiri 11 pabrik gula, kemudian meningkat menjadi 17 pabrik gula pada 1921, dan beberapa tahun berselang bertambah lagi menjadi 19 pabrik gula.

Untuk mendukung kegiatan perkebunan tebu di wilayah Bantul, pada tahun 1924 pemerintah Kolonial Belanda membangun infrastruktur berupa bendungan yang cukup baik, untuk mengairi lahan perkebunan tebu di wilayah Bantul, bendungan itu adalah Bendungan Kamijoro dan Bendungan Mejing.



Gambar 2.4. Bendungan Kamijoro yang diresmikan oleh Peresmian Bendungan Kamijoro oleh Hamengku Buwana VIII dan Residen P.W. Jonquier pada tanggal 28 Februari 1924, yang saat ini masih berfungsi dengan baik.

Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

¹HGU adalah hak guna usaha sebagai istilah untuk saat ini. Dalam masa kolonial, hak ini disebut sebagai hak *erfpacht*: hak sewa tanah milik negara selama maksimal 75 tahun untuk usaha perkebunan dan atau pertanian.



Gambar 2.5. Bendungan Mejing yang terletak di Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul.
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019



Gambar 2.6. Gejlik Pitu yang terletak di Kecamatan Sanden, Bantul.
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

2.4 Perkembangan Pendidikan Bantul Tahun 1831-1942

Perubahan sosial akan selalu menjangkau ke segala lini kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan. Perubahan sosial akan mempengaruhi segala aktivitas maupun orientasi pendidikan yang berlangsung. Intervensi kekuatan proses tersebut juga mencakup semua proses pendidikan yang terjadi di berbagai aspek lain masyarakat, baik dari tingkat mendasar yaitu keluarga sampai interaksi antar pranata sosial. Sebagai bagian dari pranata sosial, tentunya pendidikan akan ikut terjaring dalam hukum-hukum perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sebaliknya, pendidikan sebagai wadah pengembangan kualitas manusia dan segala pengetahuan tentunya menjadi agen penting yang ikut menentukan perubahan sosial masyarakat ke depan. Karena perubahan sosial mengacu pada kualitas masyarakat sementara kualitas masyarakat tergantung pada kualitas pribadi-pribadi anggotanya maka tentunya lembaga pendidikan memainkan peranan yang cukup signifikan menentukan sebuah perubahan sosial yang mengarah kemajuan. Oleh karena itu, sejarah Indonesia sejak masa kolonial tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang dinamika pendidikan dan perubahan sosial.

Sistem kolonisasi pemerintah Belanda yang merajalela di bumi nusantara telah membawa dampak yang luas bagi perkembangan modernisasi di berbagai bidang, termasuk komunikasi, transportasi, dan edukasi. Keadaan tersebut menimbulkan mobilisasi sosial yang lebih tinggi serta memunculkan golongan intelegensia. Sistem kolonisasi yang diadakan oleh Belanda bersamaan dengan diperkenalkan bentuk-bentuk pendidikan modern. Mereka diajarkan berbagai keterampilan, diantaranya membaca dan menulis huruf latin, berhitung, dan keterampilan-keterampilan praktis lainnya seperti pertukangan dan pertanian yang banyak dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pendidikan ini oleh Belanda hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja, yaitu anak dari bangsawan, priyayi, atau pembesar negara.

Dalam catatan sejarah Indonesia selama masa kolonial Belanda berkuasa, terjadi beberapa kali pergantian haluan politik. Pertama politik konservatif, terutama dijalankan pada masa tanam paksa tahun 1830-1870. Dalam politik kolonial ini peranan negara hanya terbatas pada persoalan menjaga ketertiban hukum keteraturan masyarakat, sedangkan urusan perekonomian dijalankan oleh swasta, yang kemudian mendorong tumbuhnya berbagai perusahaan swasta di Indonesia. Baik politik kolonial konservatif maupun politik kolonial liberal dianggap tidak ada bedanya, karena hasil dari kedua kebijaksanaan politik tersebut tidak dapat dinikmati oleh penduduk pribumi.

Awal abad XX, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama kekuasaan Belanda, digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Dalam hal ini muncul kebijaksanaan politik yang ketiga yaitu Politik Kolonial Etis 1900-1942. Politik Etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia diubah menjadi daerah yang perlu dikembangkan, melalui tiga prinsip dasar, yaitu pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan (Poesponegoro *et al.* 1993:37). Dari ketiga prinsip dasar tersebut, pendidikanlah yang mempunyai peran penting bagi penduduk pribumi.

Sebelum muncul Politik Etis, yaitu sekitar pertengahan Abad XIX, rencana pengajaran untuk penduduk pribumi sebenarnya sudah ada, tetapi ketika itu hanya sedikit sekali tindakan dilakukan. Setelah munculnya peraturan pemerintah tahun 1818 orang-orang pribumi baru diperbolehkan masuk sekolah-sekolah Belanda. Pemerintah juga menetapkan peraturan tata tertib yang diperlukan untuk sekolah sekolah bagi penduduk pribumi. Peraturan tersebut tidak berarti apa-apa, baru tahun 1848 Gubernur Jenderal menerima kuasa untuk menggunakan biaya sebesar f 25.000 setiap tahunnya untuk pendirian sekolah-sekolah bagi kalangan Jawa khususnya. Pada tahun 1863 Menteri Fransen van De Putte telah menetapkan bahwa harus diupayakan suatu keadaan di mana penduduk pribumi diberi kesempatan untuk memperoleh pengajaran (Nasution 1983:15).



Tahun 1893 dibentuk dua jenis sekolah dasar untuk kaum Bumiputera, yaitu *Eerste Klass Inlandsche Scholen* atau sekolah Bumiputera Angka Satu dan *Tweede Klass Inlandsche Scholen* atau sekolah Bumiputera Angka Dua. Setelah Politik Etis diberlakukan tahun 1900, gagasan mengenai pendidikan di Indonesia mulai memperoleh dukungan dari Gubernur Jenderal Van Hents (1904-1908) dan Dirk Fock yang menjabat sebagai menteri urusan daerah jajahan (1905-1908) di negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan bertambah banyaknya sekolah-sekolah yang disediakan untuk rakyat bumiputera.

Kebijaksanaan Politik Etis berlaku di seluruh wilayah kolonial Belanda termasuk Surakarta dan Yogyakarta. Pada saat itu wilayah Surakarta dan Yogyakarta dianggap berbeda dengan wilayah Jawa lainnya, karena merupakan tempat kedudukan empat kerajaan yang berdiri sendiri dibawah kekuasaan negara kolonial Belanda. Kedua wilayah tersebut dinamakan *vorstenlanden* atau wilayah raja-raja (*princely state*). Di mana Surakarta mempunyai dua keraton, yaitu Kasunanan dan Mangkunegara, dan Yogyakarta juga mempunyai dua keraton, yaitu Pakualaman dan Kasultanan.

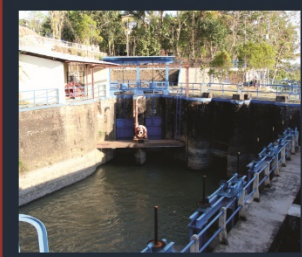
Perkembangan kota di Indonesia termasuk Surakarta dan Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari aspek historis *vorstenlanden* tersebut. Menurut Djoko Suryo (2005:30) salah satu persoalan rumit yang dihadapi kota-kota di Indonesia pada masa kini adalah persoalan penduduk, tanah dan lahan pemukiman usaha. Paling tidak pada sekitar 1900-an isu tentang peledakan penduduk, kemiskinan, lapangan pekerjaan dan perumahan serta gejala urbanisasi mulai mengemuka di Jawa, sebagaimana tercermin dalam isu tentang *Mindere Welvaart* (Kemerostan Kemakmuran) yang muncul pada masa itu. Isu-isu itu mengundang tuntutan perbaikan kebijakan dari pihak pemerintah.

Kebijakan Politik Etis dengan trilogi programnya, yaitu pendidikan, emigrasi dan irigasi, dan kebijakan Perbaikan Kampung (Kampung Verbeteringen), penanggulangan kesehatan, pendirian Lumbung Desa, Bank Perkreditan Rakyat, dan lainnya yang dilancarkan pada sekitar dua dekade pertama awal abad ke-20 merupakan solusi penting terhadap persoalan yang mengemuka pada masa itu. Hal tersebut menjadi latar belakang perkembangan kota-kota di Indonesia.



BAB 3

Bantul Zaman Jepang, Revolusi & Orde Lama Tahun 1942-1966



BAB 3. BANTUL ZAMAN JEPANG, REVOLUSI & ORDE LAMA TAHUN 1942-1966

3.1 Bantul Zaman Pendudukan Jepang

Tahun 1943 tentara Jepang baru menyentuh kakinya di Yogyakarta. Kedatangan Jepang di Yogyakarta disambut baik oleh Sultan Hamengku Buwana IX dan rakyat. Sambutan baik tersebut hampir sama terjadi di beberapa tempat di Nusantara. Karena kedatangan Jepang dianggap membawa harapan baru bagi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda.

Tujuan Jepang adalah memobilisasi massa, dengan suatu gerakan rakyat (Ricklefs 2007: 302). Pendudukan Jepang di Yogyakarta, termasuk juga daerah-daerah lain pada intinya melakukan mobilisasi 2 hal besar yaitu tenaga kerja dan hasil pertanian. Pertama, Tenaga Kerja. Mobilisasi tenaga kerja zaman Jepang bertujuan untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur pertahanan perang dan pertanian skala luas, serta menjadi tentara yang membantu Jepang dalam perang Pasifik. Di Yogyakarta, salah satu kebijakan pengerahan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur adalah pembangunan selokan Yoshiro atau lebih dikenal dengan sebutan Selokan Mataram. Selokan ini membentang dari hulunya yaitu di Kali Progo Magelang sampai Muaranya di kali Opak Yogyakarta.



Gambar 3.1. Salah satu Gua Jepang di kawasan Pundong, Bantul yang berfungsi untuk pengintaian dan perlindungan pasukan. Pembangunan gua ini melibatkan romusha asal Bantul. Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Proyek ini melibatkan kurang lebih 1.289.000 orang, di mana 68.000 orang diantaranya adalah tenaga romusha atau tenaga kerja paksa zaman Jepang. Di Bantul, kurang lebih 20 orang setiap pedukuhan mengirimkan tenaga romusha.

Pengambilan tenaga kerja warga kanan kiri calon lokasi selokan dan seluruh warga *vorstenlanden* Yogyakarta, di mana Bantul di dalamnya. Proyek ini dikerjakan tahun 1943 sampai akhir tahun 1944. Proyek ini dipengaruhi oleh pendapat Sultan Hamengku Buwana IX untuk meminimalisir pengiriman warganya ke luar daerah Yogyakarta atau luar pulau Jawa, atau bahkan sampai Burma dan Thailand. Kecuali membangun Selokan Mataram, para romusha ini juga dipekerjakan untuk membangun *bunker*⁵ di beberapa lokasi yang dianggap aman oleh pemerintah Jepang. Perekrutan orang Bantul oleh pemerintah Jepang ternyata tidak hanya untuk dijadikan romusha, tetapi juga direkrut untuk dijadikan tentara untuk membantu mereka dalam Perang Pasifik.

3.2 Bupati Kabupaten Bantul 1942-1966

Pada periode ini—antara tahun 1942 hingga 1966—adalah periode yang sangat berat bagi masyarakat Bantul maupun pemerintahannya. Periode ini adalah masa-masa perang dan transisi, baik dari penjajahan Belanda, kemudian berganti dengan Jepang yang masuk ke wilayah Bantul, perang revolusi, tahun-tahun politik, hingga pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru. Dalam masa-masa sulit tersebut, ada 7 (tujuh) bupati mulai bupati ke-12 sampai ke-18. Berikut ini nama-nama bupatinya serta profil pribadi maupun pemerintahannya:

- **KRT Djojodiningrat**

KRT Djojodiningrat adalah Bupati Bantul keduabelas dengan masa kepemimpinan selama 4 tahun dari tahun 1943 sampai 1947. Sebelum menjabat sebagai Bupati Bantul tahun 1943-1947, KRT Djojodiningrat menjabat sebagai Bupati Gunungkidul tahun 1935-1943. Sebelum itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Bupati Kulonprogo. Pengalaman memimpin dua kabupaten sebelumnya, membuat beliau memimpin Bantul dengan cekatan.

- **KRT Tirtodiningrat**

KRT Tirtodiningrat adalah bupati ketigabelas yang memerintah Kabupaten Bantul pada periode perang revolusi atau oleh masyarakat Bantulkarang disebut dengan zaman-zaman clash. Pada waktu itu, Belanda kembali ke Indonesia untuk mau merebut kembali negeri ini yang sudah merdeka. Di Bantul, perang revolusi ini terjadi dasyat. Bantul dan Yogyakarta menjadi lokasi penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada periode ini. Selain zaman perang revolusi, Pada

⁵*Bunker* adalah 1 lubang perlindungan di bawah tanah; 2 ruangan yang dipakai untuk pertahanan dan perlindungan dari serangan musuh, biasanya berupa tumpukan pasir; 3 tempat dalam kapal untuk menyimpan bahan bakar (arang atau minyak) lihat <https://kbbi.web.id/bunker>. Orang lebih mengenalnya dengan istilah Gua Jepang.

masa pemerintahan KRT Tirtodiningrat, Kabupaten Bantul berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum Daerah secara bertingkat.



Gambar 3.2. Panitia Pemilu Tahun 1951 menggunakan *bumbung* sebagai tempat suara.
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

- **KRT Purwaningrat**

KRT Purwaningrat adalah Bupati Bantul keempatbelas, memerintah antara tahun 1951-1955. Salah satu kebijakan KRT Purwaningrat yang pengaruhnya dirasakan sampai sekarang adalah perubahan nama Kecamatan Panggang menjadi Bambang Lipuro, seperti termuat dalam Lembaran Daerah No. 8 tertanggal 1 Agustus 1955 dan diumumkan secara luas pada tanggal 15 September 1955.

Perubahan nama itu, selain karena alasan praktis terdapat kesamaan nama dengan kecamatan lain, sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan, secara sosial juga sangat penting. Nama lama, yaitu Panggang adalah nama sebuah kampung kecil di wilayah itu. Di pihak lain, nama baru, yaitu Bambang Lipuro, memberikan identitas yang lebih dapat diterima bersama oleh masyarakat. Selain itu, Lipuro merupakan tempat bersejarah yang sampai sekarang masih dihormati oleh masyarakat luas di Yogyakarta, karena dipercaya sebagai tempat bertapa Panembahan Senapati, pendiri Kerajaan Mataram Kotagede.

- **KRT Brataningrat**

Di kalangan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, KRT Brataningrat dikenal sebagai pemimpin yang berpengalaman dan banyak memberikan kemajuan pada wilayah yang dipimpinnya. Beliau adalah Bupati Bantul kelimabelas. Sebelum menjabat sebagai Bupati Bantul pada akhir tahun 1955 sampai 1958, beliau menjabat Bupati Gunungkidul tahun 1952-1955.

Terdapat 19 (sembilan belas) daerah enclave antara lain: Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Giriredjo, Dlingo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh, Djatimuljo, Terong, Segorojoso, Bawuran, Wonolelo, Singosaren, dan Djagalan. Setelah melalui proses politik yang panjang, melibatkan berbagai pihak baik tingkat daerah maupun pusat, maka keluarlah UU Darurat 5/1957 tentang perubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kotagedhe, dan Ngawen. Kemudian UU Darurat ini diperkuat dengan UU 14/1958 tentang penetapan UU Darurat 5/1957 menjadi Undang-Undang.

Dalam bidang kesehatan, periode kepemimpinan Brataningrat juga menorehkan momentum penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tanggal 22 Januari 1958, Nyonya Brataningrat membuka gerbang Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (BP4) sebagai tanda dimulainya secara resmi layanan pengobatan bagi penderita penyakit paru-paru di Bantul, langkah pemerintah tersebut begitu penting pada saat itu dalam rangka memberantas penyakit paru-paru yang banyak diderita oleh masyarakat Bantul pada saat itu (Purwanta *et al.*, 2015:31).



Gambar 3.3. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4), saat ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Khusus Paru RESPIRA, terletak di Palbapang Bantul.
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

- **KRT Wiraningrat (1958).**

KRT Wiraningrat ditunjuk oleh DPD Istimewa Yogyakarta menjadi Bupati Bantul dan dilantik tanggal 20 Juni 1958 di pendopo Kabupaten Bantul (Purwanta *et al.*, 2015:39-40). Beliau adalah Bupati Bantul keenambelas. Beliau menggantikan KRT Brataningrat yang berhenti masa jabatannya karena kebijakan pemerintah pusat dan DPD Istimewa Yogyakarta. KRT Wiraningrat menjabat sebagai bupati tidak lama, hanya 2 bulan saja, karena pada tanggal 23 September

1958, beliau meninggal dunia. Oleh karena itu, beliau belum banyak meninggalkan jejak ke pemerintahannya di Bantul.

KRT Wiraningrat merupakan tokoh yang cukup dikenal oleh masyarakat Yogyakarta. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 1903. Sebelum ditunjuk menjadi Bupati Bantul, beliau menjabat di beberapa posisi dalam pemerintahan antara lain: GAIB Kulon Progo tahun 1925; Mantri Polisi Jogja tahun 1927; Mantri Polisi Kalasan tahun 1928; Asisten Wedono Tempel tahun 1933-1934; Sekretaris Kabupaten Wonosari tahun 1935; Asisten Wedana Ngaglik tahun 1938; Asisten Wedana Bantul tahun 1939; Wedana Sleman tahun 1944; Bupati Anom Sentolo tahun 1946; Bupati Anom di Kepatihan tahun 1947; dan Bupati Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul tahun 1958. Selain itu beliau juga menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1956-1958.

Dalam lapangan pergerakan, KRT Wiraningrat pernah menjadi anggota Jong Java, Budi Utomo, BPRI, Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Kabupaten Sleman. Selama masa agresi Belanda ke 2, 1948-1949, beliau bertindak menjadi penghubung antara pemerintah dalam kota dengan luar kota. Selain aktif dalam pemerintahan, KRT Wiraningrat juga aktif dalam bidang pendidikan.

- **Slamet Setyosudarmo**

Setyasudarmo meniti karir kepegawaian mulai dari paling bawah. Pada tahun 1940 beliau bekerja di Onderneming Pundong sebagai juru pengairan dam Mejing. Tanggungjawab Setyasudarmo adalah menjaga ketersediaan air bagi tanaman tebu yang dikelola oleh Onderneming Pundong. Pada tahun 1946, Setyasudarmo terpilih menjadi Carik atau Sekretaris Desa Panjangrejo. Jabatan itu diembannya sampai tahun 1955.

Keterpilihan Setyasudarmo layak dicatat dengan tinta emas bagi sejarah Bantul, karena beliau merupakan bupati pertama yang berasal dari kalangan rakyat biasa atau kawula alit. Bupati-bupati sebelumnya selalu dijabat oleh kaum bangsawan dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dan Setyasudarmo sama sekali tanpa gelar kebangsawanan. Setyasudarmo meninggal pada hari Rabu Wage 13 Mei 1981 dan dimakamkan di dusun Gedangan, Panjangrejo, Pundong.

Setyosudarmo merupakan Bupati pertama di Kabupaten Bantul yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilihan daerah tahun 1957. Prestasi beliau yang paling menonjol di Kabupaten Bantul adalah dalam bidang pembangunan pertanian yang masih dapat dirasakan hingga sekarang. Setyosudarmo mengerti betul bahwa ketersediaan air merupakan hal utama dalam pertanian sawah. Beliau membangun dam-dam air di sungai-sungai yang melintas di Kabupaten Bantul, yaitu Sungai Bedog di barat dan Sungai Winogo di timur. Dua sungai tersebut menyediakan air yang melimpah, namun saat itu belum termanfaatkan secara optimal, dan hanya mengalir langsung ke laut selatan melalui sungai besar Opak dan Progo.



Gambar 3.4. Pak Wardoyo, anak ke-4 Bupati Bantul 1958-1960 Slamet Setyosudarmo saat berdiri di atas puing rumah orang tuanya di Gedangan Pundong Bantul yang rata dengan tanah akibat Gempa Mei 2006. Beliau sedang menunjuk ruang kamar untuk anak-anak Slamet Setyosudarmo, termasuk kamar pak Wardoyo waktu kecil. Rumah ini dibuat tahun 1890. Sebagian bahan rumah berupa kayu jati berasal dari Bantul dan Gunungkidul. *Sumber Foto: Tim peneliti 2019.*

- **KRT Sosrodiningrat**

KRT Sosrodiningrat (1960-1969) Beliau adalah cucu dari Sultan Hamengku Buwana VII. Lahir di lingkungan keraton Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 1917. Orang tuanya bernama GBPH Suryobronto dan Hastutiningsih. Lulus dari MULO, beliau melanjutkan sekolah di Mosvia Magelang, yaitu sekolah khusus pamong praja (setingkat SMA). Setelah lulus, Sosrodiningrat bekerja sebagai *gediplomeerd ambtenaar inlandsche bestuur* (GAIB)⁶ di Sewon Bantul.

Bupati Sosrodiningrat sangat berjasa dalam bidang pendidikan di Bantul. Salah satunya yaitu pembangunan sebuah gedung sekolah yang sekarang bernama SMA Negeri I Bantul pada tahun 1963 bersama temannya yakni Sartono dan KRT Pringgadiningrat. Pada awalnya, SMA ini bernama SMA Persiapan, kemudian menjadi SMA Filial SMA Negeri 1 Yogyakarta (Teladan), lalu tahun 1964 berubah menjadi SMA Negeri 1 Bantul seiring dengan pindahnya ke Jl Wahid Hasyim Palbapang Bantul. Sebelumnya, sekolah ini berada di Jl. Kartini Tlirenggo Bantul.

Pada masa pemerintahannya, terjadi peristiwa politik tahun 1965. Pada saat itu (peristiwa G30S), Bupati Sosrodiningrat sedang rapat kerja di Jakarta bersama bupati dari seluruh Indonesia. Situasi sungguh mencekam di Bantul, apalagi terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Istri dan

⁶ Sekarang setara dengan sekretaris camat

anak-anak Suryodiningrat mengungsi ke rumah keluarga Suryodiningratan hingga beliau kembali ke Bantul dari Jakarta.

Dalam upaya mengatasi situasi, Suryodiningrat bekerjasama dengan anggota Muspida yaitu Kepala Korem dan Kapolres Bantul untuk mengamankan daerahnya. Hampir setiap malam, Bupati beserta Kepala Korem dan Kapolres keliling kota untuk menjaga keamanan dan melindungi penduduk.

3.3 Dinamika Politik Bantul 1942-1966

Peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat awal bulan Agustus 1945 membuat Jepang kalah dalam Perang Dunia ke II ini. Momentum kekalahan Jepang tersebut dipergunakan oleh *founding father* Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi tersebut disambut baik oleh Raja Kasultanan Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan merdeka mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu menyatakan bergabung dan meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia (Purwanta *et al.*, 2015). Atas keputusan itu pula, Pemerintah Republik Indonesia menghargainya dengan memberikan status Daerah Istimewa bagi Yogyakarta.

Sejak tahun 1945-1949, Bantul sebagai kota satelit utama dari Yogyakarta berperan besar dalam perang revolusi maupun perebutan klaim kuasa politik atas wilayah dengan musuh utama tetap Belanda dan Sekutu yang ingin menguasai kembali tanah jajahannya.

Bantul juga menjadi saksi sejarah gugurnya Pahlawan nasional bernama Komodor Udara Adisutjipto di Dukuh Ngoto Bangunharjo Sewon Bantul pada tanggal 29 Juli 1947. Saat itu, pesawat Dakota C-47 dengan registrasi VT-CLA yang ditumpangi salah satunya oleh Adisutjipto ditembak jatuh oleh pesawat Belanda, P-40 KittyHawk. Sampai sekarang, tempat jatuhnya pesawat tersebut diabadikan menjadi monumen perjuangan TNI AU. Selain itu, Bantul juga menjadi salah satu tempat bergerilya Jenderal Besar Sudirman selama perang revolusi yaitu agresi Belanda I dan II. Jenderal Besar Sudirman memulai gerilya selama 6 bulan dengan kondisi sakit, melakukan perjalanan ke timur sejauh + 1000 km ke Pracimantoro, Wonogiri hingga Ponorogo. Beliau kembali ke Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949 dari hutan dekat Karangmojo Gunungkidul, setelah dipanggil Presiden Sukarno dengan menyuruh Letkol Suharto untuk menjemput.

Setelah kurang lebih 4 tahun Ibu kota di Yogyakarta, pada tahun 1950 Ibu kota kembali lagi ke Jakarta setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Tempat lain yang menjadi monumen sejarah di Bantul yaitu Monumen Bibis. Monumen Bibis di Bantul ada dua, keduanya memang dijadikan Pos Komando Wehrkreise III oleh Letkol. Soeharto. Pos pertama adalah di Dusun Bibis, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Bantul, yang menempati rumah Lurah Segoroyoso. Sayangnya monumen ini tidak begitu terawat. Padahal

monumen ini menyimpan pesan sejarah penting perjalanan bangsa ini. Karena di tempat inilah Letkol. Soeharto merencanakan Serangan Umum 1 Maret 1949.



Gambar 3.5. Monumen Prasasti Bibis, Desa Segoroyoso, Pleret.

Sumber Foto: Peneliti 2019



Gambar 3.6. Monumen Prasasti Bibis di Dusun Bibis, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan.

Sumber Foto: Peneliti 2019

Pos Komando kedua terletak di Dusun Bibis yang terletak di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan di rumah milik Hardjowiyadi yang saat itu menjabat kepala dukuh Bibis dijadikan markas Wehrkreise III dengan komandan Letkol. Soeharto. Pembuatan dua Pos Komando Wehrkreise III ini sebenarnya merupakan strategi perang yang diterapkan oleh Letkol. Soeharto untuk membohongi pasukan Belanda. (Oemar Sanoesi *et al*, 1981).

3.4 Dinamika Ekonomi Bantul 1942-1966

Ketika Jepang masuk ke Nusantara dan mengakhiri penjajahan Belanda, Jepang mulai mengambil alih perkebunan-perkebunan tebu pada bulan Agustus 1943 di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan baru sesudah itulah pengelolanya yang berkebangsaan Eropa ditawan (Ricklefs 2007: 408-9). Sementara di daerah Yogyakarta, Jepang mengambilalih pabrik-pabrik pengolahan tebu. Tetapi sejak depresi ekonomi yang melanda dunia tahun 1930, sangat memukul keras industri gula. Dan hal itu berdampak pada perkebunan dan pabrik tebu di Yogyakarta. Dari 19 pabrik tebu yang ada di Yogyakarta, hanya 7 saja yang masih beroperasi. Jepang hanya mengambilalih 4 pabrik tebu saja, karena yang lain sudah kolaps. Politik bumi hangus yang dilancarkan baik oleh tentara Belanda, tentara Jepang, maupun tentara Indonesia tak luput berdampak pada pabrik gula yang ada di Bantul khususnya dan di Yogyakarta pada umumnya. Tetapi pada tahun 1955, Sultan Hamengku Buwana IX membangun pabrik gula baru bernama PG Madukismo diatas puing bangunan bekas PG Padokan.

Kecuali bidang pertanian, ekonomi Bantul pun disangga oleh bidang industri. Hasil-hasil industri pribumi itu antara lain: 1) Berbagai macam senjata tradisional seperti keris, tombak, pedang, dan panah; 2) barang-barang dari emas dan perak; 3) aneka jenis kain batik; 4) payung biasa dan payung emas; 5) berbagai produk anyaman, termasuk tikar; 6) produk tembaga tuang seperti tempat nasi, kuwali, dan perabot dapur lain; 7) barang-barang dari besi seperti timbangan, kunci, skrup, stempel, tang, dan lain-lain; 8) berbagai barang dari tanah liat; 9) barang-barang dari kulit; 10) pakaian jawa; 11) alat-alat pertanian; 12) produk bordir; 13) pot bunga; 14) peralatan dapur; 15) aneka macam produk kerajinan kayu; 16) peralatan untuk menangkap ikan; 17) manik-manik; 18) gamelan; dan 19) alat potong (Haryono 2009: 123).

Meskipun kurang dari 10 % penduduk Bantul yang menjalani kehidupan industri ketimbang pertanian, hal ini sangat signifikan. Karena 10 % tersebut mampu untuk menyerap tenaga kerja dari para penduduk yang memiliki surplus waktu dalam pengerjaan pekerjaan pertanian.

Situasi ekonomi pedesaan di Bantul terutama pada akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an mendapati keadaan yang sulit. Salah satu penyebabnya akibat kemarau panjang dan wabah tikus yang melanda hampir merata di seluruh Bantul dan bahkan di berbagai tempat di Jawa. Banyak petani yang gagal panen karena hama, dan tidak mampu memproduksi lahan pertanian karena kemarau panjang. Pada saat yang sama, situasi nasional sedang tidak mendukung. Pada saat itu, orientasi pemerintah Indonesia lebih menitikberatkan pada urusan-urusan politik ketimbang urusan ekonomi. Inflasi melanda, ditambah dengan situasi politik yang memanas terutama dari tiga golongan partai yakni partai nasionalis, parta agamis, dan partai komunis.

3.5 Dinamika Sosial Budaya Bantul 1942-1966

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan sensus penduduk tahun 1930 yaitu 498.687 jiwa dengan rincian Laki-laki: 243.052 jiwa dan Perempuan: 255.635 jiwa. Sedangkan total penduduk karesidenan Yogyakarta atau daerah *vorstenlanden* Yogyakarta sebesar 1.559.027. Pada waktu itu ada, 5 kabupaten yang berada di wilayah Yogyakarta. Bantul tergolong berpenduduk padat, karena sepertiga penduduknya berada di Yogyakarta. Fakta menarik jika kita melihat statistik penduduk kabupaten Bantul pada tahun 1961 yang jumlah penduduknya hanya naik sebesar 29 jiwa saja selama 30 tahun. Jumlah penduduk Bantul tahun 1961 yaitu 498.716 jiwa dengan rincian Laki-laki : 241.180 dan Perempuan: 258.606 jiwa (Purwanto 2011: 150).

Ada beberapa sebab mengapa jumlah penduduk tahun 1930 dan tahun 1961 jumlahnya nyaris sama. Sebab itu antara lain: depresi ekonomi tahun 1930 yang menyebabkan kesulitan ekonomi dan banyak kelaparan yang menyebabkan kematian; pengerahan tenaga kerja zaman jepang berupa romusha yang menyebabkan kematian dengan diawali penyakit beri-beri dan juga penyerahan

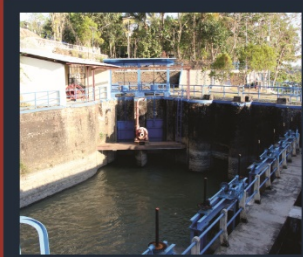
tenaga kerja militer yang menyebabkan kematian; perang kemerdekaan dan revolusi 1945-1949; *pageblug* kekeringan dan kelaparan pada akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an. Semua itu yang menyebabkan tidak seimbangnya antara kematian dan kelahiran, sehingga dengan jeda waktu 30 tahun, jumlah penduduknya nyaris sama.

Dalam bidang kesehatan, di Bantul terdapat 3 rumah sakit besar yang sampai dengan saat ini masih melayani pasien. Rumah sakit yang paling tua yaitu RSPAU Dr. S. Hardjolukito terletak di Banguntapan Bantul, RSUD Panembahan Senopati yang dibangun tahun 1953 awalnya adalah rumah sakit yang melayani penderita *hongerodem* (busung lapar). Rumah sakit ketiga yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang didirikan tahun 1966 oleh para tokoh Muhammadiyah kala itu.

Dalam bidang pendidikan, fasilitas pendidikan di Kabupaten Bantul pada dekade pertama abad ke-20 ada Sekolah Rakyat (*Volks School*) di beberapa tempat. Sekolah menengah pertama di Bantul didirikan tanggal 21 Juli 1955. Tim pendiri antara lain KRT Purwodiningrat (Bupati Bantul ketika itu), KRT Brotoningrat, KRT Dirdjoningrat, dan Prodjokastowo. Tim pendiri tersebut kemudian menunjuk R. Murdani Hadiatmodjo sebagai kepala sekolah. Saat ini kita kenal dengan SMP Negeri 1 Bantul. Untuk sekolah menengah atas pertama baru didirikan tahun 1963. Pada masa bupati KRT Sosrodiningrat (1960-1969), beliau bersama Bapak Sartono dan Bapak KRT Pringgodingrat mendirikan SMA Persiapan Negeri Bantul dan dibuka pada tanggal 17 September 1963. SMA ini yang sekarang kita kenal dengan SMA Negeri 1 Bantul.

BAB 4

Bantul Zaman Orde Baru & Reformasi Tahun 1967-2016



BAB 4. BANTUL ZAMAN ORDE BARU & REFORMASI TAHUN 1967-2016

4.1 Bantul Zaman Orde Baru Dan Reformasi

Di Kabupaten Bantul, pergantian kepemimpinan politik dari Orde Lama ke Orde Baru juga terasa dampaknya. Salah satu dari dampak tersebut adalah penempatan pemimpin daerah Kabupaten Bantul yang awalnya dari kalangan keluarga Kasultanan dan kalangan sipil, kemudian sejak orde baru, Bupati ditunjuk dari kalangan militer pada awalnya, serta pemilihan bupati yang berasal dari kalangan militer setidaknya sampai tahun 1998.

Dalam bidang ekonomi, pembagunan pertanian melalui revolusi hijau juga terjadi di Bantul. Revolusi hijau adalah salah satu kebijakan ekonomi orde baru dibidang pertanian yang tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan jumlah produksi padi menuju swasembada pangan tahun 1970. Dalam bidang sosial budaya, di Bantul tidak banyak yang berubah dengan periode-periode sebelumnya. Hanya saja, aktor dan bentuk kesenian di Bantul mengecualikan seni-seni yang beraliran kiri, karena dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Sementara itu, Program Keluarga Berencana sukses dilaksanakan di kabupaten Bantul. Untuk keberhasilan Program Keluarga Berencana, di Kalirandu, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul didirikan sebuah monumen yang kemudian diresmikan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Pakualam VIII, pada tanggal 13 Oktober 1986.



Gambar 4.1. Monumen APSARI di Kalirandu, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul.

Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

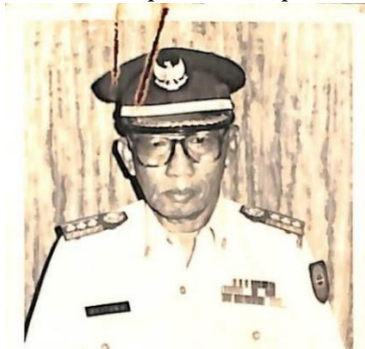
4.2 Bupati Kabupaten Bantul 1966-2016

Pada periode ini—antara tahun 1966 hingga 2019—adalah periode yang cukup panjang yang berisi tentang dua era yaitu orde baru dan reformasi. Pada periode orde baru, Kabupaten Bantul dan daerah yang lain di Indonesia menjalani periode pembangunan dalam berbagai bidang. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, era orde baru antara tahun 1966 hingga 1998 mengedepankan pembangunan ekonomi dan tidak menghidupkan dinamika politik kepartaian. Sebuah antitesis dari apa yang terjadi pada zaman orde lama ketika Presiden Soekarno memberikan porsi lebih terhadap dinamika politik kepartaian. Para pemimpin daerah di Bantul pada periode ini juga menjalankan pemerintahannya sesuai dengan apa yang terjadi di Jakarta. Ketika Orde Baru runtuh bersamaan dengan krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998, era reformasi membawa banyak sekali perubahan.

Di Bantul muncul kekuatan baru yaitu Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memenangkan Pemilu serta menjadikan salah satu kadernya menjadi Bupati tahun 1999 dan terpilih kembali melalui pilkada langsung tahun 2005. Dalam periode Orde Baru dan Reformasi, terdapat 10 (sepuluh) bupati mulai bupati ke-20 sampai ke-30.

- **R Soetomo Mangkusasmito, SH**

R Soetomo Mangkusasmito, SH adalah Bupati Bantul kedua puluh yang menduduki jabatannya selama 10 tahun, (1970-1980). Bupati ini dari kalangan militer. Lulus dari Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) tahun 1963 dan terakhir berpangkat Kolonel Angkatan Darat Corps Kehakiman Militer (Kol CKH AD). Salah satu ciri dan gaya kepemimpinan beliau di Bantul adalah kedisiplinan yang tinggi. Tahun 1971 beliau mengharuskan semua aparat pemerintah dari kelurahan sampai kabupaten untuk memakai sepatu dan menetapkan jam kerja dair pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00. Penegakan disiplin yang lain yaitu kewajiban mengadakan upacara bendera setiap hari senin untuk mendisiplinkan, memupuk nasionalisme, serta media pemberian perintah-perintah mingguan.



Gambar 4.2. Bupati R. Soetomo Mangkusasmito, SH.
Sumber Foto: Arsip Kab. Bantul

Pembangunan fisik tidak terbatas pada jalan menuju Pantai Samas, tetapi juga beberapa wilayah lain, seperti ke wilayah Srandakan dan Surobayan di bagian barat, sedang di bagian timur ke arah Imogiri melalui jalur timur (jalan Imogiri Timur), ke arah Imogiri melalui jalur barat (Imogiri Barat) dan Kretek. Di wilayah-wilayah itu kemudian juga berkembang usaha jasa transportasi antar kabupaten.

Kebijakan R. Soetomo Mangkusamito, S.H. lain yang cukup monumental adalah pembukaan isolasi daerah Kecamatan Pajangan di Bantul bagian barat dan Kecamatan Dlingo di Bantul bagian timur. Kedua daerah ini terisolasi karena kondisi bentang alam berupa pegunungan dan beberapa sungai yang memisahkan mereka dengan pusat Kota Bantul. Beliau membangun jalan tembus, jembatan, juga sarana pendidikan dan infrastruktur ekonomi lainnya.

Kerja keras Bupati membuahkan hasil dan mendapatkan apresiasi dengan Kabupaten Bantul memperoleh anugerah dari Pemerintah Pusat berupa Parasunya Purna Karya Nugraha pada tahun 1975. Sebuah penghargaan untuk daerah dengan pembangunan 5 tahun yang memuaskan. Dengan demikian, kabupaten Bantul merupakan yang pertama di lingkungan DIY yang menerima penghargaan itu. Oleh karena itu, Gedung di kompleks kantor bupati sejak itu disebut sebagai Gedung Parasunya sebagai penanda bahwa Kabupaten Bantul pernah memperoleh penghargaan tersebut.



Gambar 4.3. Gambaran Keindahan Pantai Samas Bantul.

Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

- **Suheram Partosuputro**

Suheram Partosuputro adalah Bupati Bantul kedua puluh, yang menduduki jabatan bupati selama satu periode 1980-1985. Suheram lahir tahun 1927 dan tumbuh di lingkungan Karaton Mangkunegaran Solo. Sebelum menjabat sebagai Bupati Bantul, beliau adalah seorang tentara Angkatan Udara.



Gambar 4.4. Bupati Suheram Partosuputro.
Sumber Foto: Arsip Kab. Bantul.

Pada tahun 1981 Suheram ditunjuk oleh Dewan Pemilihan Kepala Daerah (Dewan Eksekutif) sebagai Bupati Bantul. Bantul yang banyak tumbuhan bambu dianggap oleh Suheram sebagai pertanda daerah “sepi” sehingga orientasi orang dari Jogjakarta tidak ke selatan tetapi ke Solo atau Magelang. Sehingga Suheram ingin mengubah Bantul dari kota “sepi” menjadi kota “ramai”.

Bupati Suheram juga membangun ekonomi Bantul dari bidang pertanian dengan membangun atau memperbaiki saluran irigasi sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Perkembangan pertanian juga merujuk pada kebijakan pertanian nasional yaitu intensifikasi pertanian dengan kegiatan panca usaha tani yang meliputi: Pemilihan bibit unggul, pemberian pupuk kimia, pengairan sawah, penanaman yang baik, dan pemberantasan hama melalui pestisida. Pada periode pemerintahan beliau, terjadi perubahan besar dalam bidang pertanian, munculnya varietas-varietas baru jenis tanaman dengan berorientasi pada hasil-hasil panen padi untuk mendukung swasembada pangan.

Dalam bidang perbankan, Bupati Suheram Partosuputro meresmikan BPR BANK BANTUL pada awal Pendiriannya dikenal sebagai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Dati II Bantul. Bank ini didirikan pada tahun 1983. Dalam bidang sosial keagamaan, jejak peninggalan beliau masih ada hingga saat ini yaitu Masjid Agung di Kota Bantul. Dalam bidang pendidikan, salah satu peristiwa bersejarah lain yaitu peresmian Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dikenal dengan ISI Yogyakarta tahun 1984.



Gambar 4.5. Peresmian Kampus ISI Yogyakarta oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notokusanto tahun 1985.
Sumber Foto: isi.ac.id

- **Moerwanto Suprpto**

Moerwanto Suprpto atau KRT Suryo Padmo Hadiningrat menduduki jabatan bupati sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1991. Beliau adalah Bupati Bantul kedua puluh dua. Karir beliau sebelum menjadi Bupati adalah di bidang militer. Beliau seorang prajurit TNI berpangkat terakhir mayor jenderal.



Gambar 4.6. Bupati Moerwanto Suprpto.
 Sumber Foto: Arsip Kab. Bantul





Pada periode ini, pembangunan jalan lingkar Jogja berhasil diselesaikan. Mulai digagas oleh Universitas Gadjah Mada dan dibicarakan dengan Sultan dan Pemerintah Provinsi DIY tahun 1970an, lalu direalisasikan pembangunannya mulai tahun 1980an, dan akhirnya selesai dikerjakan tahun 1990. Lahan lokasi adalah jalan sempit dengan pepohonan, semak, dan sawah. Kemudian lahan tersebut diubah menjadi jalan lingkar atau lebih dikenal dengan sebutan *ringroad* dengan total panjang 20 km, di mana separuh di antaranya berada di kabupaten Bantul. Jalan lingkar ini bertujuan untuk mengalihkan kendaraan-kendaraan dari luar Yogyakarta yang akan masuk ke kota Yogyakarta untuk dapat melewati pinggir kota. Gunanya secara ringkas adalah untuk menghindari penumpukan kendaraan yang akan menuju ke kota.

Dalam bidang pariwisata, Moerwanto Suprpto meningkatkan geliat lokasi wisata gerabah di Kasongan Bantul yang sudah mulai terkenal sejak tahun 1971-1972 (Wawancara Wardoyo 21 November 2019). Lokasi wisata pembuat gerabah ini pada awalnya dikembangkan oleh Sapto Hudoyo, seorang seniman besar Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1980an, oleh Sahid Keramik, kawasan gerabah ini mulai tumbuh pesat menjadi destinasi wisata para wisatawan hingga sekarang. Selain itu, dalam masa kepemimpinan beliau, Kecamatan Pundong mulai dikenal orang sebagai daerah penghasil kerajinan Keramik. Pantai Parangtritis sebagai destinasi wisata mulai sangat terkenal pada masa kepemimpinan Pak Moewanto. Moewanto Suprpto merupakan Bupati Bantul pencipta Motto Bantul yang masih menjadi spirit Bantul hingga saat ini yaitu **Projotamansari** yang merupakan akronim dari Produktif-Profesional, Ijo royo royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Selain itu, beliau juga sekaligus pencipta lagu **Mars Projotamansari**.

- **Sri Roso Sudarmo**

Sri Roso Sudarmo atau KRT Yudadiningrat adalah Bupati Bantul kedupuluh tiga yang menduduki jabatannya selama 7 tahun (1991-1998). Sama seperti bupati sebelumnya, beliau berlatarbelakang militer dengan terakhir berpangkat Kolonel Artileri Angkatan Darat.

Pada pemerintahan beliau, dibangunlah sebuah pendopo yang sangat megah dan menjadi salah satu ikon kabupaten Bantul yaitu pendopo Parasamya. Pendopo yang dibangun pada tahun 1995 ini sampai dengan sekarang menjadi pendopo Bupati Bantul yang digunakan untuk acara-acara kedinasan Kabupaten Bantul maupun acara sosial kemasyarakatan.





Gambar 4.7. Foto Bupati Sri Roso Sudarmo.
Sumber Foto: Arsip Bantul

Pemberian nama pendopo ini (Parasanya) ada hubungannya dengan penerimaan penghargaan Parasanya Purna Karya Nugraha yang diterima oleh Sri Roso Sudarmo. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh presiden kepada pemerintah daerah atas kinerja tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tahun 2017, Bantul meraih penghargaan serupa pada masa kepemimpinan Drs. H. Suharsono.



Gambar 4.8. Pendopo Parasanya. Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Salah satu industri kreatif yang muncul pada masa kepemimpinan Sri Roso Sudarmo adalah kerajinan patung “Asmat” yang ada di dusun Pucung Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Tahun 1993, ada salah satu pengusaha perkayuan

terkenal bernama Ambar Polah memberikan contoh produk Patung Asmat kepada warga Pucung. Lalu para warga mulai memproduksi patung tersebut yang awalnya berukuran besar kemudian berkembang dengan ukuran-ukuran kecil dengan berbagai fungsi misalnya asbak, tempat handphone, tempat pulpen dan tempat *CD Player*. Mereka mengekspor kerajinan tersebut. Industri ini semakin memakmurkan masyarakat pembuatnya ketika terjadi krisis ekonomi 1998 dimana harga dollar naik meroket dan pengrajin Pucung masih bisa ekspor seperti halnya kerajinan batik topeng di Krebet dan gerabah di Kasongan.



Gambar 4.9. Salah satu kerajinan patung primitif (Asmat) di Pucung Bantul.
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Ketika terjadi krisis ekonomi dan politik tahun 1997, membuat kekuasaan orde baru runtuh pada tahun 1998, dan sejak tahun 1999 era Reformasi bergulir dengan segala bentuk perubahan yang signifikan. Secara politik, pemilihan kepala daerah langsung oleh masyarakat di Bantul dimulai tahun 2005 dan terpilih Drs. HM Idham Samawi sebagai Bupati Bantul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk masa bakti 2005-2010. Sebelumnya HM Idham Samawi juga menjabat sebagai Bupati Bantul periode 1999-2004.

- **Drs. HM Idham Samawi**

Drs. HM. Idham Samawi (1999-2004 dan 2005-2010). Beliau adalah Bupati Bantul keduapuluh delapan. Beliau lahir di Yogyakarta 22 Juni 1950, putra HM Samawi, seorang tokoh pers Yogyakarta dan salah satu pendiri harian Kedaulatan Rakyat, salah satu koran tertua di Yogyakarta. Selama dua periode pemerintahan beliau, ada banyak bidang yang menjadi perhatian beliau antara lain diantaranya yaitu di bidang pada pengembangan pertanian, industri kerajinan, industri pariwisata, ekonomi berbasis lokal, dan pembangunan infrastruktur.



Gambar 4.10. Bupati Drs. Idham Samawi, Wakil Bupati Sumarno (2005-2010) beserta Istri. Sumber Foto: Arsip Kab. Bantul

Pada periode pertama pemerintahan Idham Samawi, telah menorehkan prestasi yaitu peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan. PAD Bantul tahun 1999 sebesar Rp 6 M, dan pada tahun 2005 meningkat 5 kali lipat menjadi Rp 30 M. Beliau punya dua program yaitu "program padamu negeri" dan "program yang berorientasi profit". Pada tahun 2010, 42% warga Bantul hidup dari sektor pertanian. Dalam bidang pertanian, beliau memfokuskan diri pada penataan dan produktifitas daerah selatan dengan mengintrodusir dan mengembangkan pertanian bawang.

Sedangkan program selanjutnya yaitu "Program berorientasi profit" antara lain proyek Bantul Kota Mandiri (BKM) yaitu membuat desa-desa pinggiran Bantul menjadi unit perekonomian terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas pemukiman, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat rekreasi. Dalam bidang infrastruktur, ada dua monumental besar yaitu pembangunan stadion sultan agung dan taman gabusan.

Pada 27 Mei 2006, masyarakat Bantul menerima ujian yang sangat berat yaitu adanya Gempa Bumi berkekuatan 5,9 Skala Richer. Dari data BPBD Bantul, jumlah korban meninggal di wilayah Bantul ada 4143 korban meninggal, dengan jumlah rumah rusak total 71.763, rusak berat 71.372, rusak ringan 66.359 rumah. Keberhasilan Bupati Bantul, HM Idham Samawi dalam mengatasi korban bencana hanya dalam waktu dua tahun dapat diacungi jempol. Dia pernah mendapat undangan dari Jepang dan Usbekhistan untuk memaparkan pengalamannya meskipun dia tak sempat datang karena masih sibuk mengatasi korban gempa.

- **Hj. Sri Surya Widati**

Hj. Sri Surya Widati (2010-2015) adalah Bupati Bantul keduapuluh sembilan sekaligus Bupati Bantul perempuan pertama. Beliau adalah istri dari Bupati Bantul

sebelumnya yaitu Idham Samawi. Salah satu yang menonjol dalam perjalanan pemerintahannya yaitu pengembangan wisata berbasis alam yang ada di Becici salah satunya. Tentu saja dengan pengembangan wisata alam yang lain. Orientasi yang menjadi unggulan tidak lagi pada pantai, tetapi pada suasana pegunungan. Obyek wisata yang lain yaitu Kebun Buah Mangunan yang juga menjadi destinasi yang terus dikembangkan.



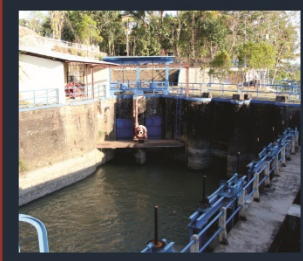
Gambar 4.11. Keindahan Wisata Puncak Becici.
Sumber Foto : Tim Peneliti 2019

Sedangkan dari perspektif masyarakat, menurut penelitian ini, Hj. Sri Surya Widati dilihat prestasinya dalam hal produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Dalam hal Produktifitas mendapatkan indeks 2,74 dengan kategori baik. Hal ini karena efektifitas dan efisiensi birokrasinya yang sudah baik dan membuat masyarakat puas, selain itu juga masyarakat mengatakan bahwa Bupati memiliki dedikasi yang baik.

Dalam hal responsivitas, rata-rata indeks yang diperoleh 2,69 dengan kriteria baik, karena adanya peningkatan kualitas pendidikan, kualitas sarana dan prasarana ekonomi, masyarakat semakin sejahtera, kemudian peningkatan dalam hal ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu saja sarana dan prasarana publik untuk penanggulangan bencana mengalami peningkatan. Sementara itu, aspek akuntabilitas mendapatkan indek 2,73 dengan kategori baik. Dalam hal akuntabilitas bupati mampu untuk mengelola keuangan daerah dan mampu untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

Toponimi Kecamatan di Kab. Bantul



BAB 5. TOPONIMI KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL

5.1 Kecamatan Dlingo



Gambar 5.1. Kantor Kecamatan Dlingo
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Wilayah Dlingo awalnya merupakan daerah *enclave*, Imogiri Surakarta. Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957, wilayah Imogiri (Surakarta) dan Kotagede (Surakarta) dimasukkan dalam wilayah DIY. Kemudian tahun 1958, Dlingo menjadi kapanewon atau kecamatan tersendiri yang membawahi 6 Desa yaitu Dlingo, Mangunan, Temuwuh, Muntuk, Terong, dan Jatimulyo.

Tabel 5.1. Daftar Desa dan Dusun Di Kecamatan Dlingo

Desa	Dusun
Dlingo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dlingo I 2. Dlingo II 3. Karipan I 4. Karipan II 5. Pokoh I 6. Pokoh II 7. Pakis I 8. Pakis II 9. Kebosungu I 10. Kebosungu II
Mangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cempluk 2. Mangunan 3. Sukorame 4. Lemahbang 5. Kediwung



Desa	Dusun
	6. Kanigoro
Muntuk	1. Gunung cilik 2. Muntuk 3. Sanggrahan I 4. Sanggrahan II 5. Banjarharjo I 6. Banjarharjo II 7. Tangkil 8. Karangasem 9. Seropan I 10. Seropan II 11. Seropan III
Temuwuh	1. Tekik 2. Temuwuh 3. Salam 4. Klepu 5. Kapingan 6. Nglampengan 7. Jambewangi 8. Jurug 9. Tanjung 10. Lungguh 11. Ngunu 12. Tanjan
Terong	1. Kebo kuning 2. Saradan 3. Pancuran 4. Rejosari 5. Terong I 6. Terong II 7. Pencitrejo 8. Sendangsari 9. Ngenep
Jatimulyo	1. Maladan 2. Tegallawas 3. Gayam 4. Bandean 5. Semuten 6. Banyuurip 7. Loputih 8. Kedug ayak 9. Rejosari 10. Dodogan

Sumber: Kecamatan Dlingo dalam angka, 2018



Kecamatan Dlingo yang berada di Kabupaten Bantul ikut disebutkan oleh budayawan Imam Budi Santosa dalam buku *Suta Naya Dhadhap Waru, Manusia Jawa dan Tumbuhan* (2017). Sebagai pakar tanaman yang juga tinggal lama di Yogyakarta, Imam Budi Santosa menyakini sejarah nama Kecamatan Dlingo tersebut bertemali erat dengan jenis tumbuhan, bukan karena terkena pengaruh sistem kekuasaan Mataram Islam maupun tokoh kerajaan yang terkenal. Di masa silam, masyarakat Bantul yang notabene wong Jawa tentu menamai wilayahnya bukan tanpa dasar atau nama dlingo tidak ujug-ujug muncul begitu saja.

Merujuk pustaka *Javanese-English Dictionary* (1974) “dlingo” (bêngle) diartikan *certain herbs brewed into folk medicines*. Dalam dunia medis atau pengobatan tradisional, **dlingo** (*Acorns calamus*) bagi masyarakat Bantul begitu bermakna, sehingga tanpa ragu mereka mencomot nama “**dlingo**” sebagai identitas daerah. Merujuk sumber pustaka dan tradisi lisan yang berkembang, kawasan ini dinamai Dlingo lantaran tempo doeloe banyak dijumpai tumbuhan dlingo yang mempunyai banyak faedah bagi kehidupan masyarakat Bantul. Mencuat fakta dalam *Serat Centhini* yang ditulis tahun 1814-1823 yang menjelaskan perihal “dlingo”: *jampi bêtèr-êtis wontèn kawan warna/ kang sawarna sêdhah kapanggih rosira/ bêngle dlingo ron ringin têtmu langya*. Terjemahan: jamu untuk mengobati meriang, terdapat empat macam. Salah satunya berupa sirih, daun bengle dlingo, daun beringin, dan temulawak

Sesepeuh setempat bisa bercerita bahwa **dlingo** biasanya tumbuh subur dekat sungai atau rawa. Jika dibudidayakan, penanamannya pun sering berdekatan dengan pembuangan air di rumah-rumah warga pedesaan Bantul. Tidak hanya gampang ditemukan di Bantul, dlingo bisa dijumpai pula di daerah lain dengan penamaan yang berbeda. Sebagai contoh, Aceh (*jeurunger*), Minang (*jarianggu*), Sunda (*daringo*), Madura (*harango*), dan Makassar (*kareango*). Kedekatan masyarakat Bantul dengan **dlingo** terbukti dari pengetahuan yang masih terawat dalam memori kolektif hingga sekarang. Dijelaskan bahwa **dlingo** memiliki rimpang yang menjalar dan berdaging. Rasanya tidak enak, pedas dan pahit. Sebelum permulaan abad XX yang ditandai dengan abad pencerahan dan modernitas, penduduk setempat percaya bahwa dlingo digolongkan sebagai rempah-rempah yang memiliki khasiat obat.

Memotret tradisi Jawa yang berkembang di Bantul, dlingo sering dipadukan dengan bengle, sebagaimana tersurat dalam petikkan tembang *Serat Centhini* di atas tadi. Salah satu kehebatan ramuan “dlingo-bengle” yang terkenal adalah ketika dikaitkan dengan fenomena supranatural. Masyarakat Bantul klasik percaya bahwa dlingo-bengle bisa dipakai untuk menangkal atau mengusir roh jahat yang mengganggu manusia. Caranya dengan memberi olesan dlingo-bengle disertai doa-doa tertentu ketika yang bersangkutan kerasukan roh hingga tidak sadarkan diri. Karena itulah dalam tradisi Jawa-Bantul di masa silam, setiap keluarga biasanya selalu menyimpan dlingo-bengle.

Di Bantul, dulu kala **dlingo** dan bengle acap dipadukan menjadi ramuan jamu tradisional yang bermanfaat sebagai penyegar atau menyehatkan badan.

Bagian yang digunakan ialah akar rimpangnya. Unsur rimpang mampu mengobati demam, sakit kepala, masuk angin, dan lainnya. Sedangkan daun dlingo dipakai obat sakit perut, mual, dan kurang nafsu makan. Sebelum masyarakat Bantul mengenali pengobatan modern (dokter) dan masih memanfaatkan bahan alam yang tersedia di sekitarnya di masa lampau, dlingo terbukti menjadi pendukung ramuan medis secara tradisional. Dari kenyataan sejarah ini, maklum jika nama *dlingo* dipakai untuk nama daerah (kecamatan) karena diyakini banyak dijumpai *dlingo* di wilayah tersebut. Toponim atau asal-usul nama Kecamatan Dlingo ini mencerminkan pula kemandirian masyarakat Bantul dalam pengadaan obat tradisional yang merupakan warisan leluhur yang hidup dari generasi ke generasi.

5.2 Kecamatan Jetis



Gambar 5.2. Kantor Kecamatan Jetis
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948, tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Jetis yang awalnya memiliki 15 kalurahan berubah menjadi 4 kalurahan saja, yaitu (1) Kalurahan Canden menggabungkan Kralas (sebagian), Suren, dan Gadungan; (2) Kalurahan Patalan menggabungkan Bakulan, Kategan, Kralas (sebagian), Gerselo, dan Gaduh; (3) Kalurahan Sumberagung menggabungkan Beji, Barongan, Bulus, dan Sawahan; (4) Kalurahan Trimulyo menggabungkan Karangsemut, Blawong, dan Ponggok. Empat Kalurahan atau Desa tersebut bertahan sampai saat ini dengan jumlah padukuhan yaitu: Desa Canden meliputi 15 pedukuhan; Desa Patalan meliputi 20 pedukuhan; Desa Sumberagung meliputi 17 pedukuhan; dan Desa Trimulyo meliputi 12 pedukuhan.

Tabel 5.2. Daftar Desa dan Dukuh di Kecamatan Jetis

Desa	Dusun
Patalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakulan Kulon 2. Bakulan Wetan 3. Ngaglik 4. Gelangan 5. Jetis 6. Tanjung Lor 7. Tanjung Karang 8. Gaduh 9. Patalan 10. Panjangjiwo 11. Karangasem 12. Sulang Lor 13. Gerselo 14. Sulang Kidul 15. Dukuh Sukun 16. Butuh 17. Boto 18. Kategan 19. Ketandan 20. Bobok
Canden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadungan Kepuh 2. Gadungan Pasar 3. Jayan 4. Wonolopo 5. Kiringan 6. Banyudono 7. Suren Kulon 8. Suren Wetan 9. Gaten 10. Beran 11. Plembutan 12. Canden 13. Kralas 14. Pulo Kadang 15. Ngibikan
Sumberagung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sawahan 2. Balakan 3. Ngentak 4. Paten 5. Bungas 6. Barongan 7. Kiyaran 8. Pangkah 9. Medelan 10. Cangkring

Desa	Dusun
	11. Beji 12. Turi 13. Kertan 14. Bulus Kulon 15. Manggung 16. Titang 17. Nogosari
Trimulyo	1. Blawong I 2. Blawong II 3. Bembem 4. Kembang Songo 5. Sindet 6. Cembing 7. Bulu 8. Karang Semut 9. Puton 10. Denokan 11. Ponggok I 12. Ponggok II

Sumber: Kecamatan Jetis dalam angka, 2018

Cerita perihwal nama *Jetis* yang menjadi identitas Kecamatan Jetis masih berjejalin dengan dunia flora. Membedah khasanah kebudayaan Jawa, lema “*jethis*” adalah sinonim dari kata “siyung”. Kamus *Bausastra Jawa* yang disusun Poerwadarminta tahun 1939 menjelaskan dua arti yang terkandung dalam terminologi siyung: *untu lancip (antarane bam karo untu ngarêp)*; *irah-irahan (perangan) ing bawang*. Terjemahan bebasnya: siyung: gigi tajam (di antara geraham dengan gigi depan); pucuk atau bagian paling atas pada bawang. Dari dua arti ini, yang seialur dengan rantai sejarah lokal Kecamatan Jetis ialah perkara bawang. Tafsir historisnya, daerah tersebut di masa lampau ditumbuhi tanaman bawang. Maka, segenap warga Bantul bersepakat membangun identitas nama daerah Jetis.

Bukan hanya khusus di Bantul, nama “*Jetis*” untuk identitas daerah merupakan sebuah fenomena umum di Yogyakarta. Guna memastikan, kita bisa melihat toponim Kampung Jetis dan Kampung Jetisharjo yang masuk wilayah Kalurahan Cokrodiningratan dapat ditelusuri riwayatnya melalui akar kata: *jetis* dan arjo. Istilah “arja” merujuk pustaka berjudul *Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun* garapan Wintêr (1928) memuat arti *prayogi, rahajêng, pantês, wêwulang, bêning, mulya, raras, dan bagus*. Dari uraian makna dua istilah itu, dapat diterangkan Jetisharjo adalah di lokasi tersebut tempo dulu tumbuh bawang yang bermutu. Masyarakat setempat tanpa ragu menamai daerah itu dengan sebutan Jetisharjo.

Pakar botani Imam Budi Santosa (2017) mencuplik cerita kuno para pekerja pembuatan piramida di Mesir acap diberi makanan yang mengandung bawang putih demi menjaga stamina mereka. Di tlatah Jawa ada berbagai varietas bawang

putih yang dibudidayakan, seperti jenis Tawangmangu, lumbu hijau, lumbu kuning, Cirebon, dan lainnya. Tapi mayoritas ditanam pak petani adalah jenis lumbu hijau dan lumbu kuning. Bawang putih sesungguhnya bisa digarap di dataran rendah maupun tinggi. Namun kenyataannya pertanaman bawang masih banyak dilakoni di pegunungan. Pasalnya, untuk menghasilkan produksi berkelas, bawang putih perlu curah hujan 100-200 mm/bulan. Terlampau banyak hujan gampang busuk, tapi jika kurang hujan pertumbuhannya terganggu (kerdil). Bawang putih menghendaki sinar mentari bersuhu 18-25° C. Sementara untuk kelembaban berkisar 60-70%.

Dari realitas aneka fungsi bawang bagi masyarakat Bantul dan dijumpai tanaman bawang putih yang berkualitas, sehingga mendorong lahirnya toponim Kecamatan Jetis merupakan kenyataan sejarah yang sukar disangkal.

5.3 Kecamatan Pundong



Gambar 5.3. Kantor Kecamatan Pundong
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Pundong yang awalnya memiliki 9 kalurahan berubah menjadi 3 Kelurahan saja, yaitu (1)Kalurahan Panoyangrejo menggabungkan Panjang, Gedangan, dan Krapyak; (2)Kalurahan Seloharjo menggabungkan Biro dan Dermajurang; (3)Kalurahan Srihardono menggabungkan Munggang, Patrabayan, Pundong, dan Nangsri. Saat ini, kecamatan Pundong tetap 3 Desa yaitu Panjangrejo, Seloharjo, dan Srihardono.

Tabel 5.3. Daftar Desa Dan Dusun di Kecamatan Pundong

Desa	Dusun
Seloharjo	1. Dukuh 2. Nambangan 3. Pentung



Desa	Dusun
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Darmojurang 5. Bobok tempel 6. Geger 7. Soka 8. Karangasem 9. Ngentak 10. Biro 11. Kalipakem 12. Blali 13. Ngreco 14. Poyahan 15. Jelapan 16. Kalinampu
Panjangrejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grudo 2. Jamprit 3. Nglembu 4. Tarungan 5. Gedangan 6. Badan 7. Panjang 8. Soronanggan 9. Gedong 10. Watu 11. Jetis 12. Nglorong 13. Semampir 14. Krapyak Kulon 15. Krapyak Wetan 16. Gunung Puyuh
Srihardono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sawahan 2. Candi 3. Monggang 4. Tangkil 5. Baran 6. Piring 7. Pundong 8. Jonggrangan 9. Gulon 10. Paten 11. Pranti 12. Potrobayan 13. Tulung 14. Klisat 15. Nangsri



Desa	Dusun
	16. Seyegan
	17. Ganjuran

Sumber: Kecamatan Pundong dalam angka, 2018

Dalam pustaka *Almanak* yang terbit H. Buning tahun 1895, menyebutkan mantri pulisi pemimpin daerah ***Pundhong (Pundong)*** bernama Ngabèi Natadiprana di bawah pengawasan kepala distrik Godhean, Radèn Panji Natadirja. Fakta ini membuka pemahaman historis bahwa nama wilayah administratif Pundong telah lama ada, bahkan diyakini sebelum era kolonial. Analisanya, merujuk kamus *Bausastra Jawa* yang disusun Poerwadarminta tahun 1939, terminologi Pundhong artinya *suket* atau rumput. Maka, dapat ditegaskan bahwa toponim nama Kecamatan Pundhong berasal dari jenis flora, bukan tokoh ternama maupun aktivitas masyarakat di masa lampau.

Kecamatan Pundong tempo dulu memang dikenal banyak ditumbuhi rerumputan. Masyarakat Bantul, bahkan orang Jawa di pedesaan umumnya cukup akrab dengan tanaman ini untuk makanan ternak, khususnya kambing. Hewan berkaki empat ini sering mengisi kandang ternak di rumah warga Bantul yang masuk kategori *rajakaya*. Berdasarkan penelitian K. Heyne dalam buku *Tumbuhan Berguna Indonesia I-IV* (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Departemen Kehutanan, 1987), dikenal pula jenis suket banjaran (*Calamagrostis australis*). Rumput ini terhitung rumput menahun, tingginya antara 15-80 cm. Batangnya tegak tapi pangkal batangnya terbaring ke tanah. Biasanya membentuk rumpun sendiri di sela semak belukar pada hutan dataran tinggi. Dahulu rumput ini kebanyakan tumbuh di sepanjang kawasan pegunungan pada ketinggian 1.500-3.000 m dpl.

Tidak semua jenis rumput disukai orang Bantul, contohnya rumput krisik (*Paspalum scrobiculatum*). Menurut pakar botani Yogyakarta, Imam Budi Santosa (2017), perkembangan fisik rumput ini terhitung kuat. Sering membentuk rumpun besar dengan ketinggian hingga 2 m. Batangnya berdiri tegak kadang miring, daunnya lembut. Tumbuh tersebar di seluruh Nusantara hingga ketinggian 1.700 m dpl. Biasa terdapat pada kawasan yang agak lembab seperti tebing sungai dan pinggiran hutan. Di masa lalu, jika rumput krisik tumbuh di perkebunan teh, karet, kopi, dan kina dianggap sebagai gulma pengganggu dan segera dimusnahkan. Karena itulah pembididayaannya jarang dilakukan. Risikonya, karena tidak terlampau dikenal daya gunanya oleh masyarakat maka keberadaan rumput ini makin diabaikan.

Dalam majalah *Kajawèn* edisi November 1928 yang diterbitkan Balai Pustaka merekam peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Pundong. Berikut ini kami kutipkan faktanya:

Tiyang nama Bok Pawira ing Dhusun Pundhong, Ngayogya, mèh tiwas jalaran manak dipun pitulungi ing dhukun kampung, tujunipun lajèng

kêtulungan ing dhukun bayi (vroedvrouw) saking griya sakit Petronelah. Punika nocogi kados suraosing karangan ing Kajawèn nomêr 2 ing bab dhukun kampung.

Terjemahan bebasnya: seorang warga bernama mbok Pawira yang tinggal di Desa Pundhong, Yogyakarta, hampir saja meninggal dunia lantaran melahirkan ditangani oleh dukun kampung. Beruntung ia kemudian diselamatkan (ditangani) dukun bayi resmi dari rumah sakit Petronelah.

Dari keterangan majalah lawas di atas, diketahui bahwa Desa Pundong yang selanjutnya menjadi kecamatan, dulu masih berupa pedesaan yang jauh dari jangkauan pengaruh modernisasi kolonial, ditandai dengan kehadiran dukun kampung dan pemahaman warga yang kurang mengenai persalinan ibu yang hendak melahirkan.

Dalam kesempatan lain, jurnalis Kajawèn edisi Maret 1937 mengabarkan pengalaman menarik 3 warga Pundhong. Berikut ini kisah ringkasnya:

Wontên tiyang tiga saking Pundhong (Ngayogya) ingkang satunggal sakit mripat, dhatêngipun mriku sarana katuntun, kônca ingkang kalih sami gadhah panuwun piyambak-piyambak, kajawi namung badanipun piyambak ingkang mangrêtos. Tiyang ingkang wuta wau sampun sipêng tigang dalu, padamêlanipun namung tansah adus saha ngunjuk toya pancuran wau. Wusana sapunika lajêng sagêd sumêrêp rêgêmênging tiyang, wit-witan saha tanêman, minggah mandhapipun dhatêng lèpèn tampa dipun tuntun malih sampun sagêd humampah piyambak.

Terjemahan bebasnya: ada 3 orang dari Pundong, Yogyakarta yang 1 menderita sakit mata. Penderita ini datang (tambahan penerjemah: ke sendang Sidamulya) dengan cara dituntun. Dua temannya itu juga mempunyai permintaan masing-masing tatkala berkunjung ke sendang yang dijual orang tersebut. Orang Pundong yang buta tadi sudah bermalam selama tiga hari. Di situ, ia mandi serta minum air pancuran yang mengalir dari sendang. Tanpa dinyana, matanya bisa melihat keramaian orang, juga pepohonan, dan naik-turun sungai tanpa harus dituntun temannya, sebab sudah bisa berjalan sendiri.

Kabar jurnalis tersebut membuka kesadaran bahwa kawasan Pundong pada dekade ketiga abad XX sudah ramai ditinggali masyarakat, bukan sebuah alas (hutan) atau ruang kosong tanpa manusia. Bahkan, tahun 1928 dijumpai warga Pundong yang cerdas bernama Siswamiharja membagikan pengetahuan tentang flora, yakni lombok, di majalah *Kajawèn*, edisi Januari. Kutipkan informasi penting itu:

Kula badhe matur bab tanêman lombok pêthak (lombok gadhing), kangge ing Ngayogya sak sumêrêp kula lombok wau namung kangge pêthetan, katanêm wontên pot utawi pakêbonan, malah kula sumêrêp wontên tiyang ing Patalan (Bantul) piyambakipun gadhah pêthetan wit lombok pêthak kalih uwit, ing ngriku kula takèni sêdyanipun namung kangge pêthetan, sarêng wohing lombok langkung andados, lajêng dipun pêthiki sabên dintên kangge tamal bêtah pawon, kalih uwit kemawon sampun tirah kangge bêtahing kêlan sabên dintênipun, tur warnipun sac kados kanthil pêthak, manawi ingkang andados godhongipun ngantos botên katingal. Sarêng wangsul kula saking ngriku gadhah kêpengin ambibit, sabab kula ngèngêti angsal kalih-kalih wau. Sarêhning kula botên gadhah pot inggih namung kula sukakakên kuwali amoh kemawon, kula jèjèr-jèjèr wontên tritis griya, punika tamtu badhe mikantuki.

Dari paparan fakta ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Pundong begitu erat hubungannya dengan dunia flora di masa silam, tanpa kecuali pundhong atau rumput untuk makanan ternak kambing. Saking dekatnya dengan tanaman pundhong, maklum bila dipakai untuk nama wilayah.

5.4 Kecamatan Srandakan



Gambar 5.4. Kantor Kecamatan Srandakan
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-naerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Srandakan yang awalnya memiliki 8 kalurahan berubah menjadi 2 kalurahan saja, yaitu (1) Kalurahan Trimurti menggabungkan Srandakan, Mangiran, dan Paron; (2) Kalurahan Poncosari menggabungkan Saptokondo, Wonotingal, Sambikerto, Sajaurip, dan Trinidadadi. Saat ini Kecamatan Sandrakan tetap terdiri dari dua desa saja yaitu Trimurti dan Poncosari.



Tabel 5.4. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Srandakan

Desa	Dusun
Poncosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Singelo 2. Talkondo 3. Godekan 4. Wonotingal 5. Bayuran 6. Polosiyo 7. Gunturgeni 8. Besole 9. Sambeng I 10. Sambeng II 11. Sambeng III 12. Jragan I 13. Jragan II 14. Bibis 15. Kokap 16. Koripan 17. Jopaten 18. Bodowaluh 19. Karang 20. Babakan 21. Krajan 22. Ngentak 23. Kuwaru 24. Cangkring
Trimurti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Srandakan 2. Greso 3. Klurahan 4. Prokerten 5. Jetis 6. Sawahan 7. Puron 8. Puluhan Kidul 9. Puluhan Lor 10. Pedak 11. Gunungsaren 12. Gunung Saren Lor 13. Nengahan 14. Lopati 15. Bendo 16. Celan 17. Canguman



Desa	Dusun
	18. Mangiran
	19. Sapuangin

Sumber: Kecamatan Srandakan dalam angka, 2018

Tahun 1895 penerbit H. Buning mengeluarkan pustaka berjudul *Almanak* memuat informasi penting nama kepala dhistrik di Srandakan, yakni Mas Panji Jayayuda. Pimpinan distrik (kecamatan) tersebut menitahkan mantri pulisi Gumulan (Ngabèi Jayawiruna), Bayuran (Ngabèi Jayaprawira), dan Sandèn (Ngabèi Jayawêcana) untuk kerja serius dalam mengelola wilayah yang dipegangnya. Secuil fakta ini menyediakan pemahaman historis bahwa nama wilayah administratif Srandakan telah lama ada, dan diyakini bertemali dengan era gemilang kerajaan Mataram Islam.

Asal kata Srandakan adalah “*srandra*”, dan memperoleh imbuhan “*an*” yang menunjuk keterangan tempat. Ditelisik dalam kamus *Bausastra: Jarwa Kawi* karangan Padmasusastra (1903), terminologi “*sranda*” merupakan sinomin dari kata “*ratu*”. Ada sederet persamaan kata Sranda, yakni hipati, dipati, dipatya, sinuhun, sri, sri narahaji, sri narendra, sri naranata, sri nararyya, sri naradipa, sri nareswara, sri narpa, sri naraprabu, sranda, srinda, srindra, sri nata, sri pamasa, sri maha, sri maharaja, sri mulku, sri bupati, sitipati, susuhunan, sang hulun, sang nata, dan sang siniwi.

Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan bahwa toponim nama Kecamatan Srandakan berasal dari tempat khusus untuk raja kala plesiran ataupun berkunjung untuk menghibur diri, bukan mengacu pada jenis flora maupun aktivitas masyarakat di masa silam. Analisa historis ini menyakinkan dengan merujuk karangan lama Kusumatmaja yang berjudul “Pasisir Kidul Ing Zaman Rumiyyin Tuwin ing Samangke”.

Berikut ini kami kutipkan:

Watawis kalih dasa taun kapêngkêr kula nate dhatêng Ngayogyakarta, lajêng dhatêng sagantên kidul médal ing Srandakan. Sawég sapisan punika kula sumêrêp wujudipun sagantên kidul. Sadèrèngipun kula dumugi sapinggiring sagantên, saking katêbihan kula sampun mirêng gumludhuging alun tanpa kèndêl. Manawi swaranipun sêpur katikêlakên sadasa, dèrèng sami kalihan swaraning alun wau. Marginipun dhatêng pinggiring sagantên anglangkungi pawêdhèn alus. Sarèhne nalika samantên watawis jam kalih wêlas siyang, dados pun wêdhi bêtèripun ngudubilah. Bokmanawi inggih makatên punika bêtèripun sagantên wêdhi ing tanah Aprikah utawi tanah Arab. Suku tansah kicat-kicat kados ngambah blubukan awu ingkang wontên latunipun.

Terjemahan bebasnya: Dua puluh tahun silam saya pernah datang ke Yogyakarta. Kemudian berkunjung ke laut selatan melewati Srandakan.

Baru kali itu saya melihat wujud laut selatan. Sebelumnya saya sampai pinggir laut, karena dari kejauhan saya sudah mendengar gemuruh ombak di pesisir tanpa henti. Barangkali suara kereta api berjumlah sepuluh, belum bisa menyamai suara gemuruh ombak itu. Jalan menuju pinggir laut melewati pasir halus. Saat itu pukul 12.00 siang, jadi hawanya panas sekali. Mungkin seperti ini panasnya lautan pasir di tanah Afrika atau tanah Arab. Kaki panas kelonjatan seperti menginjak abu yang masih ada apinya.

Fakta ini mencuatkan Srandakan sebagai jalur utama yang dilalui pelancong atau tokoh masyarakat yang hendak pergi plesiran menikmati indahnya lautan dan deburan ombak. Pada masa lalu, raja mempunyai kegemaran plesiran bersama keluarga bangsawan di pantai untuk menghibur diri maupun untuk kepentingan ritual. Tidak mengherankan jika daerah yang jadi tempat pemberhentian petinggi istana Mataram Islam detik itu dikekalkan oleh masyarakat lokal dengan sebutan Srandakan.

5.5 Kecamatan Kretek



Gambar 5.5. Kantor Kecamatan Kretek
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Kretek yang awalnya memiliki 12 kalurahan berubah menjadi 5 kalurahan saja, yaitu (1) Kalurahan Tirtomulyo menggabungkan Soropadan, Bracan, Karan, dan Krajan; (2) Kalurahan Tirtosari menggabungkan Kirabayan, dan Juregan; (3) Kalurahan Tirtohargo menggantikan Gunungkunci; (4) Kalurahan Tirtoharjo menggabungkan Sono, dan Grogol; (5) Kalurahan Donotirto menggabungkan Gadingharjo, Banyudono, dan Kradenan. Sampai saat ini, kecamatan Kretek terdiri dari 5 Desa, dimana ada nama desa baru yaitu Parangtritis yang menggantikan Kalurahan Tirtoharjo.

Tabel 5.5. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Kretek

Desa	Dusun
Tirtomulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plesan 2. Paliyan 3. Karen 4. Gondangan 5. Kergan 6. Bracan 7. Tokolan 8. Tluren 9. Gaten 10. Jebugan 11. Karangweru 12. Genting 13. Soropadan 14. Jetis 15. Punduhan
Parangtritis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kretek 2. Sono 3. Samiran 4. Bungkis 5. Depok 6. Duwuran 7. Grogol VII 8. Grogol VIII 9. Grogol IX 10. Grogol X 11. Mancingan
Donotirto	<ol style="list-style-type: none"> 12. Kalipakel 13. Gading daton 14. Palangjiwan 15. Gading lumbung 16. Gadingharjo 17. Mersan 18. Colo 19. Busuran 20. Sruwuh 21. Tegalsari 22. Metuk 23. Greges 24. Mriyan
Tirtosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulekan I 2. Mulekan II 3. Pangkah 4. Cimpon 5. Tegaltapen 6. Buruhan

Desa	Dusun
Tirtohargo	7. Galan
	1. Baros
	2. Muneng
	3. Gunung Kunci
	4. Gegunung
	5. Kalangan
	6. Karang

Sumber: Kecamatan Kretek dalam angka, 2018

Nama “**Kretek**” yang diabadikan menjadi nama Kecamatan Kretek oleh masyarakat Bantul berkenaan dengan alat penghubung yang membentang dari dua lokasi yang terpisah untuk dilalui warga di masa silam. **Kretek** merujuk pada jembatan yang berukuran relatif besar. Pasalnya, di Jawa ada istilah “wot” untuk menyebut jembatan kecil atau hanya berukuran setapak berbahan kayu yang biasa dipasang di sawah. Lantaran di wilayah ini dijumpai sebuah kretek penghubung yang masih langka dan berukuran besar, maka kata kretek dicomot untuk penamaan atau identitas wilayah.



Gambar 5.6. Jembatan Kretek. Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Contoh fakta orang Bantul sudah mengenal lama **Kretek** dapat ditelisik dalam majalah *Kajawèn* edisi Januari 1937. Dikisahkan banjir di Yogyakarta:

Lèpèn Opak, Oya tuwin Winanga mêngtas sami bêna agêng. Pangagêng nagari ingkang wajib sami mriksani dhatêng papaning bêna. Krètèk Parangtritis kèli, lampahing têtumpakan kandhêg. Kathah kewan tuwin griya sami ical, kasangsan tiyang botên wontên. Sakubêngipun Krètèk katingal kados sagantên. Sabin ingkang kêrêndhêm toya kintên-kintên 1500 bau.

Terjemahan bebasnya: Sungai Opak, Sungai Oya, dan Sungai Winanga dilanda banjir besar. Segenap pembesar kerajaan yang memikul kewajiban memeriksa lokasi banjir. Kretek Parangtritis ikut terseret arus banjir, maka

pemakaian sarana perlintasan ini terpaksa berhenti. Banyak hewan dan rumah juga hilang, orang tak mempunyai makin menderita. Sekitar Kretek tampak seperti lautan. Persawahan terendam air sekitar 1500 bau.

Daerah Kretek sudah dikenal sejak periode Sultan Agung yang berkuasa pada 1613-1645. Majalah *Narpawandawa* yang diterbitkan Budi Utomo tahun 1929 mengisahkan kondisi kawasan ini ketika dikunjungi raja Mataram Islam itu. Berikut ini petikan kisahnya:

*Ingang Simuhun Kangjèng Sultan Agung lajèng yasa pasanggrahan wontèn ing siti Gadhing, pasanggrahan wau dipun paringi nama: Gadhing Kêdhaton. Dene pênahipun sapunika wontèn sak lèr kilèn asistenan, **Krètèk**, ing sapunika tilasipun sampun dipun angge dhusun, ugi kasbut nama Gadhing Kêdhaton, kalurahan Gadhing Arja... Dene siti wau sasampunipun dipun badhèni kangge sabin utawi kangge pemahan, lajèng ingkang papan sabin dipun tanèmi pantun. Wondene ingkang badhe kangge wadhah pantun lajèng dipun yasakakèn lumbung, dene papanipun wontèn ing siti Gadhing wau, sarta lumbung wau dipun paringi nama lumbung Gadhing, utawi Gadhing Lumbung, pênahipun wontèn sakilèn asistenan, **Krètèk**.*

Terjemahan bebasnya: Sultan Agung kemudian membangun pesanggrahan di tanah Gadhing. Pesanggrahan ini dinamai Gadhing Kedaton. Lokasinya di sisi utara-barat kantor asistenan Kretek. Saat ini sudah dipakai untuk desa Gading Arja. Kemudian tanahnya dipakai untuk sawah dan rumah, lalu sawahnya ditanami padi. Untuk menyimpan padi, yakni di lumbung yang dinamai lumbung Gading, letaknya di barat kantor asistenan Kretek.

Majalah *Kajawèn* edisi Agustus 1938 terbitan Balai Pustaka mengabarkan sebuah peristiwa kriminal yang terjadi di Kretek. Berikut ini kutipkan:

*“Dhukun dipun cêpêng. Ing **Dhusun Krètèk, Ngayogya**, wontèn satunggiling dhukun dipun cêpêng. Dhukun punika dipun suyudi ing tiyang kathah, ingkang kathah têtayang ingkang sampun nate kaukum tuwin tiyang ngulandara. Saking cariyosing kyai dhukun, piyambakipun sagêd adamêl kédhotan dhatêng têtayang sadaya wau.”*

Terjemahan bebasnya: dukun ditangkap. Di Desa Kretek, Yogyakarta, ada seorang dukun ditangkap. Dukun ini disayangi (dikenal) orang banyak, terutama mereka yang pernah dihukum dan para gelandangan. Dari cerita kyai dukun, ia bisa membuat kebal (atos) orang-orang tersebut.

Kasus perihal dukun kekebalan di Kretek ini mendapat sorotan tajam dari kalangan jurnalis tempo itu. Para muridnya ikut dibawa ke kantor asisten wedana

di Kretek, sebelum diperbolehkan pulang. Diberitakan lebih lanjut oleh surat kabar *Kajawèn*:

*Guru dhugdhèng kacêpêng. Ing sakidul Ngayogya wontên guru dhugdhèng ingkang sampun dipun suyudi ing tiyang atusan. Rahayu lajêng kasumêrêpan ing asistèn wêdana P.I.D. kanthi Veldpolitie ing Bantul, tiyang ingkang dados guru wau lajêng dipun cêpêng. Sarêng dipun dangu tiyang wau ngakên nama Kridhoharjono, ing salêbêtipun griya sadaya wontên tiyangipun kirang langkung 223, sadaya sami muridipun. Têtayang sadaya wau sami kairid dhatêng kantor asistèn wêdana ing **Krètèk**. Sasampunipun kapriksa, têtayang ingkang ngakên dados murid sami dipun lilani wangsul, namung guru taksih dados papriksan.*

Terjemahan bebasnya: Guru kekebalan (ilmu kebal) tertangkap. Di selatan Yogyakarta dijumpai guru ilmu kebal yang sudah dipercaya ratusan orang. Kemudian, hal ini diketahui oleh asisten wedana PID atau intel polisi di Bantul. Orang yang jadi guru tersebut lantas ditangkap. Saat dipanggil, ia mengaku bernama Kridhoharjono. Di dalam rumahnya, dijumpai kurang lebih 223 orang, dan semua itu adalah muridnya. Seluruh anggota itu dibawa ke kantor asisten wedana di Kretek. Setelah diperiksa, mereka yang mengaku murid ini dilepas dan dibiarkan pulang. Sedangkan guru itu masih diperiksa

Dari rangkaian cerita faktual ini, dapat dimengerti bahwa penanda sebuah jembatan (kretek) menjadi dasar penamaan Desa Kretek yang kemudian menjadi kecamatan, bukan dilatarbelakangi tokoh terhormat maupun peristiwa historis. Juga telah ada kehidupan sosial di daerah Kretek pada periode kolonial dengan menengok bukti arsip koran dan tradisi tutur.

5.6 Kecamatan Pandak



Gambar 5.7. Kantor Kecamatan Pandak

Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Pandak yang awalnya memiliki 12 kalurahan berubah menjadi 4 Kalurahan saja, yaitu (1)Kalurahan Wijiharjo menggabungkan Kauman dan Gesikan; (2)Kalurahan Gilangharjo menggabungkan Krekah, Jodoglegi, dan Bantulan; (3)Kalurahan Triharjo menggabungkan Gunturan, Tirto, dan Siyangan; (4)Kalurahan Caturharjo menggabungkan Gluntung, Tunjungan, Tegallejang, dan Glagahan. Sampai dengan saat ini, Kecamatan Pandak tetap memiliki 4 desa yaitu Wijiharjo, Gilangharjo, Triharjo, dan Caturharjo.

Tabel 5.6. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Pandak

Desa	Dusun
Caturharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bayuurip 2. Gluntung Lor 3. Gluntung Kidul 4. Gumulan 5. Tegalsempu 6. Tunjungan 7. Krapakan 8. Samparan 9. Tegallayang 9 10. Tegallayang 10 11. Kuroboyo 12. Korowelang 13. Glagahan 14. Bogem
Triharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siangan 2. Juwono 3. Ngabean 4. Gunturan 5. Ciren 6. Jalakan 7. Jigudan 8. Tirto 9. Jaten 10. Nglarang
Gilangharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadisoro 2. Jodog 3. Karangasem 4. Daleman 5. Jomboran 6. Kauman 7. Bongsren

Desa	Dusun
	8. Kadekrowo 9. Ngaran 10. Karanggede 11. Gunting 12. Depok 13. Tegallurung 14. Banjarwaru 15. Krekah
Wijirejo	1. Pandak 2. Bajang 3. Gesikan III 4. Gesikan IV 5. Bergan 6. Ngeblak 7. Pedak 8. Kauman 9. Gedongsari 10. Kwalangan

Sumber: Kecamatan Pandak dalam angka, 2018

Secara geografis, Kecamatan Pandak berada di sisi barat daya ibukota Kabupaten Bantul. Berluas wilayah 4.069,8512 Ha dengan wilayah administratif mencakup 4 desa, yakni Desa Triharjo, Desa Wijiharjo, Desa Gilangharjo, dan Desa Caturharjo. Kemudian sisi utara berbatasan dengan Kecamatan Pajangan dan Bantul; bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Bambanglipuro dan Bantul; sebelah selatan terdapat Kecamatan Sanden; dan baratnya dibatasi Kecamatan Srandakan. Secara topografi, Kecamatan Pandak merupakan dataran rendah dan berada pada ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Jarak 5 km membentang dari ibukota Kecamatan dengan Kabupaten Bantul.

Merujuk keterangan Poerwadarminta dalam *Bausastra Jawa* (1939), terminologi "**Pandak**" mengandung beberapa arti, yakni *betah* (kerasan), dan *cendhak* (pendek). Dari analisa topografi di muka, diyakini muasal kata **Pandak** bertemali dengan kondisi wilayah. Kondisi area ini memang pendek atawa dataran rendah yang berketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, masyarakat lokal Bantul detik itu dengan mudah menamai kawasan ini dengan sebutan Pandak. Nama Pandak untuk identitas daerah tidak hanya dijumpai di Kabupaten Bantul. Misalnya, di Grobogan yang menjadi rute perang era kerajaan. Disebutkan dalam *Babad Giyanti* yang menjadi acuan berdirinya Kerajaan Kasultanan Yogyakarta 1757: *Martapura ndhêlik dhatêng Sêmarang; sarêng Pang. Mangkubumi madêg kraman wontên ing Pandhak-Karangnangka, Martapura nusul, kaparingan nama Dipati Pugêr, kautus nggêbag Grobogan kalihan Warung.* Terjemahan bebasnya: Martapura sembunyi ke Semarang. Setelah Pangeran Mangkubumi melancarkan aksi perlawanan di Pandhak-Karangnangka, Martapura

menyusul. Ia menyandang nama Adipati Puger, dan diminta mencegat di Grobakan dan Warung.

Juga jurnalis *Narpawandawa* edisi September 1934 menerangkan nama daerah **Pandhak** ada di luar Bantul: *Lèpèn bêngawan urutipun bangawan Bacêni, dumuginipun lèr dhusun Manggaran bawah kalurahan Pandhak (Baki-Kartasura) wontên kêdhungipun, winastan ing têtiyang: kêdhung Lawu*. Dengan demikian, istilah Pandak cukup populer bagi masyarakat Bantul saat itu, baik sebagai identitas wilayah maupun kondisi kawasan. Bahkan, pustaka *Almanak* tahun 1891 sudah menyurat nama pembesar distrik (kecamatan) Pandak bernama Mas Panji Jayapuspita untuk mengatur masyarakat setempat.

Perkembangan wilayah Pandak di bidang sosial-ekonomi relatif baik. Kenyataan ini merujuk pada kabar dari majalah *Kajawèn* tahun 1928 yang mengisahkan pemerintah Kasultanan Yogyakarta membangun pasar hewan di Pandak beserta wilayah lainnya:

Paprentahan Jawi ing Ngayogya adamêl pурсètèl anyaèkakên pêkên-pêkên kewan ing Gamping, Prambanan, Kutha Gêdhe, Pandhak tuwin Pangawih. Pêkên wau badhe dipun wujudakên los tosan, kalèn-kalèn tuwin sanès-sanèsipun. Ing bawah Rêdi Kidul kathah rajakaya ingkang sumêbar ing bawah Ngayogya. Taun ingkang kapêngkêr.

Terjemahan bebasnya: Pemerintah kerajaan di Yogyakarta membuat peraturan memperbaiki pasar-pasar hewan di Gamping, Prambanan, Kutha Gedhe, Pandhak dan Pangawih. Pasar tadi akan dibuat los, selokan-selokan juga lainnya. Di Gunung Kidul banyak rajakaya yang tersebar di Yogyakarta, setahun yang lalu.

Informasi berharga di muka menunjukkan bahwa wilayah Pandak cukup direken pemerintah kerajaan Kasultanan dalam penyokong pengembangan bidang ekonomi tradisional. Dalam tatanan pasar tradisional di Jawa, pasar hewan biasanya memang berada di tingkat kecamatan dengan hari pasaran yang berbeda-beda. Sebagai wilayah kecamatan, masyarakat di Pandak mempunyai pasar hewan sejak periode kerajaan. Ruang pasar ini bukan saja mewadahi transaksi jual-beli masyarakat Pandak dengan orang luar kecamatan, namun juga sebagai ruang interaksi dan menjaga kerukunan sosial.



5.7 Kecamatan Sanden



Gambar 5.8. Kantor Kecamatan Sanden
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Sanden yang awalnya memiliki 13 kalurahan berubah menjadi 4 kalurahan saja, yaitu (1)Kalurahan Gandingsari menggabungkan Samparejo, Rajuniten, Sukoharjo, dan Sedayu; (2)Kalurahan Murtigading meliputi Srihardono, Sidoharjo, dan Kartoponco; (3)Kalurahan Gadingharjo meliputi Mandingmas, dan Ronggosari; (4)Kalurahan Srigading meliputi Gunungingko, Pugeran, Srabahan, dan Kalijurang. Komposisi desa tersebut masih bertahan sampai dengan saat ini.

Tabel 5.7. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Sanden

Desa	Dusun
Gadingsari	1. Dayu
	2. Kenteng
	3. Ketalo
	4. Klatak
	5. Soka
	6. Sorobayan
	7. Bongos I
	8. Bongos II
	9. Klakaran
	10. Tegesan
	11. Nampan
	12. Nanggulan
	13. Demakan
	14. Wonorejo I
	15. Wonorejo II
	16. Patihan
	17. Wonoroto
	18. Demangan





Desa	Dusun
Gadingharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalimundu 2. Daleman 3. Merten 4. Ngujung 5. Pranti 6. Karanganyar
Srigading	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedongan 2. Ceme 3. Celep 4. Tinggen 5. Bonggalan 6. Kalijurang 7. Ngunan-uman 8. Wuluhadeg 9. Wirosutan 10. Srabahan 11. Gokerten 12. Sangkeh 13. Malangan 14. Dengokan 15. Dodogan 16. Ngeplak 17. Ngepet 18. Tegalrejo 19. Cetan 20. Sogesanden
Murtigading	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngentak 2. Pucang Anom I 3. Trisigan I 4. Trisigan II 5. Dagan 6. Sanggrahan 7. Kurahan I 8. Kurahan II 9. Piring I 10. Piring II 11. Mayungan I 12. Mayungan II 13. Pucang Anom II 14. Pucang Anom III 15. Sanden 16. Bongoskenthhi 17. Peciro 18. Kranggan

Sumber: Kecamatan Sanden dalam angka, 2018



Poerwadarminta dalam *Bausastra Jawa* (1939) mendokumentasikan terminologi “*sande*” yang memiliki beberapa arti: *wurung; wade; sarung*. Dari sekian arti ini, yang masuk akal atau sesuai logika sejarah adalah wade atau jarik dan iket yang menjadi barang dagangan. Fakta umum bahwa orang Jawa di masa silam dalam kehidupan sehari-hari mengenakan jarik untuk beraktivitas dan terasa enak dipandang mata. Tampilan perempuan dan lelaki berjarik begitu gampang dijumpai di ruang pedesaan dan perkotaan Jawa. Karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar, maka sandangan sande termasuk komoditas pokok di pasar tradisional, selain beras.

Pedagang berkerumun di Sanden ini memperoleh sande dari perkampungan industri batik. Kala itu, di *Vorstenlanden* banyak ditemukan industri batik rumahan. Tak ayal, kesinambungan perdagangan sande periode kerajaan terjaga dengan baik. Dengan demikian, muasal nama daerah Sanden tempo dulu merujuk pada aktivitas jual-beli sande atau kain jarik, bukan dilatarbelakangi kondisi wilayah ataupun ketenaran tokoh lokal yang menempati. Lantas, masyarakat setempat serempak menyebutnya dengan nama *Sanden* dan menjaganya lintas generasi.

Seiring perjalanan waktu, nama Sanden terus menempel dalam memori kolektif. Buktinya, majalah *Narpawandawa* yang diterbitkan Budi Utomo tahun 1929 sudah menyebut wilayah administratif Sanden: *Dene pamanggènipun ingkang 3 wontên ing dhusun Mayungan, ingkang 1 wontên ing dhusun Piring Gingsong, kabawah ondêr dhistrik Sandèn*. Terjemahan bebasnya: Tempat yang ke-3 di desa Mayungan. Yang pertama, terdapat di desa Piring Gingsong, dan berada di bawah Kecamatan Sanden. Diketahui, Sanden membawahi dusun Mayungan dan dusun Piring Gingsong. Jauh sebelum informasi itu ditulis, tahun 1891 pustaka *Almanak* telah menyebutkan wilayah Sanden dengan petingginya bernama Ngabèi Jayawêcana. Sanden masuk wilayah dhistrik Srandakan yang dikepalai Mas Panji Jayayuda. Biasanya, petinggi Sanden seperti Ngabèi Jayawêcana diangkat dan diberhentikan atas sepengetahuan pemerintah kerajaan Kasultanan, bukan pemerintah kolonial Belanda.

5.8 Kecamatan Pajangan



Gambar 5.9. Kantor Kecamatan Pajangan
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Pajangan yang awalnya memiliki 7 kalurahan berubah menjadi 3 kalurahan saja, yaitu (1) Kalurahan Triwidadi menggabungkan Sokadadi, Trucuk, dan Kersan; (2) Kalurahan Sendangsari menggabungkan Krebet, dan Manukan; (3) Kalurahan Guwosari menggabungkan Iroyudan, dan Selarong. Sampai dengan saat ini, komposisi desa di kecamatan Pajangan masih sama sejak tahun 1948 tersebut.

Tabel 5.8. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Pajangan

Desa	Dusun
Triwidadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guwo 2. Jojoran Wetan 3. Jojoran Kulon 4. Nanggul 5. Kersan 6. Sabrang Kidul 7. Sabrang Lor 8. Gampeng 9. Pajangan 10. Kadireso 11. Blabak 12. Polaman 13. Butuh Kidul 14. Butuh Lor 15. Kalisoko 16. Ngincep 17. Jagonandan 18. Jambean



Desa	Dusun
	19. Kayuhan Wetan 20. Kayuhan Kulon 21. Plambongan 22. Trucuk
Sendangsari	1. Benyo 2. Jetis 3. Panjangan 4. Kayen 5. Beji Wetan 6. Beji wetan 7. Gupakwarak 8. Dadapbong 9. Krebet 10. Kabrokan Wetan 11. Kabrokan Kulon 12. Kamijoro 13. Kunden 14. Manukan 15. Jaten 16. Mangir Lor 17. Mangir tengah 18. Mangir Kidul
Guwosari	1. Kembang Putihan 2. Kentholan Lor 3. Kentholan Kidul 4. Gandekan 5. Dukuh 6. Iroyudan 7. Kembang gede 8. Kadisono 9. Karangber 10. Santan 11. Kalakijo 12. Kedung 13. Bungsing 14. Watu Gedog 15. Pring Gading

Sumber: Kecamatan Pajangan dalam angka, 2018

Secara geografis, Kecamatan Pajangan bercokol di sisi barat ibukota Kabupaten Bantul. Berluas wilayah 3.324,7590 ha dengan membawahi 3 desa, yaitu Desa Sendangsari, Desa Guwosari, dan Desa Triwidadi. Bagian utara dibatasi Kecamatan Kasihan dan Sedayu; sisi timur dibatasi Kecamatan Bantul; sebelah selatan dijumpai Kecamatan Pandak; dan barat bersebelahan dengan Sungai Progo. Kreativitas dan potensi lokal yang menjadi akar sejarah Pajangan ialah



kerajinan kayu. Produk yang dihasilkan antara lain wayang klithik, topeng kayu, peralatan rumah tangga, patung hewan, loro blonyo, pigura bahkan meubel. Sebelum dijual ke luar daerah, tentu saja aneka hasil ini tentunya dipajang atau dipamerkan di rumah. Realitas ini selaras dengan keterangan dalam *Bausastra Jawa* (1939) bahwa terminologi “*pajang*” mengandung arti *dirêngga-rêngga* (supaya katona asri), *rêrênggan* (ing omah lsp). Maka, hal ini diyakini menjadi dasar penamaan wilayah Pajangan di kemudian hari.

Terminologi pajangan yang mengacu pada sesuatu yang dipamerkan atau dipertontonkan tercatat pula dalam *Serat Cénthini* yang disusun pujangga istana tahun 1814-1823. Berikut ini petilan tembangnya:

*Rawuhing pangantèn laju dhatêng ing pajangan, lajèng dhahar kêmbul.
Dalumpun sabibaripun salat sêsarêngan kawontênakên pahargyan. Nalika
ing pandhapi kawontênakên pahargyan sakalangkung ramenipun, Sèh
Amongraga dalah garwa tuwin Ni Cénthini sami wontên mèsjid panèpèn.*

Terjemahan bebasnya: datangnya pengantin menuju pajangan (pelaminan), kemudian pesta makan. Malamnya setelah sholat, bersama-sama mengadakan perayaan. Sewaktu di pendapa diadakan perayaan begitu meriah. Seh Amongraga bersama istrinya dan Centini berada di masjid.

Penghujung Abad XIX, onder distrik Pajangan dipimpin oleh Ngabèi Jayanalika yang menjabat sebagai mantri pulisi. Ia dibawah kendali Kapala dhistrik di Cèpit bernama Mas Panji Jayasêmantri. Kenyataan ini meluaskan pemahaman bahwa Pajangan sebagai ruang administratif sudah terbentuk lama sedari era kerajaan. Kini, berdasarkan data tahun 2013, Kecamatan Pajangan jumlah penduduknya 9.792 KK terdiri dari 32. 501 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kecamatan Pajangan terdiri dari 14.565 pria dan 15.452 wanita. Kepadatan penduduk di Kecamatan Pajangan adalah 903 jiwa/km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Pajangan adalah petani. Data Monografi Kecamatan Pajangan menyebutkan 12.541 orang atau 41,7 % dari seluruh penduduk Kecamatan Pajangan bekerja di sektor pertanian.

5.9 Kecamatan Imogiri



Gambar 5.10. Kantor Kecamatan Imogiri
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya,, Kapanewon (Kecamatan) Imogiri yang awalnya memiliki 11 kalurahan berubah menjadi 3 kalurahan saja, yaitu (1)Kalurahan Selopamioro meliputi Kalidaup, Siluk, dan Lanteng; (2)Kalurahan Sriharjo meliputi Mojouro, Dogongan, dan Kedungkemiri; (3)Kalurahan Wukirsari meliputi Singosaren, Pajimatan, Giriloyo, Pucung, dan Barongan. Kemudian sejak adanya Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957, wilayah Imogiri (Surakarta) dan Kotagede (Surakarta) dimasukkan dalam wilayah DIY. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang, Kecamatan Imogiri meliputi 8 desa antara lain: Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, dan Wukirsari.

Tabel 5.9. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Imogiri

Desa	Dusun
Imogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukuh 2. Kertan 3. Paduresan 4. Imogiri
Selopamioro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanteng I 2. Lanteng II 3. Lemah Rubuh 4. Jetis 5. Kedung Jati 6. Nogosari 7. Nawungan I 8. Nawungan II

Desa	Dusun
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Kajor wetan 10. Kajor Kulon 11. Siluk I 12. Siluk II 13. Pelemantung 14. Putat 15. Kalidadap I 16. Kalidadap II 17. Srunggo I 18. Srunggo II
Sriharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Miri 2. Jati 3. Majohuro 4. Pelemadu 5. Sungapan 6. Gondosuli 7. Trukan 8. Dogongan 9. Ketos 10. Ngrancah 11. Pengkol 12. Sompok 13. Wunut
Wukirsari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Singosaren 2. Bendo 3. Mangung 4. Sindet 5. Tilaman 6. Pundung 7. Kedung Buweng 8. Karang Kulon 9. Giriloyo 10. Cengkehan 11. Nogosari I 12. Nogosari II 13. Karangasem 14. Jatirejo 15. Karangtalun 16. Dengkeng
Kebonagung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandingan 2. Kanten 3. Jayan 4. Kalangan 5. Tlogo
Karangtengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemasan

Desa	Dusun
	2. Karang Tengah 3. Pucung Rowong 4. Karangrejek 5. Mojolegi 6. Numpukan
Girirejo	1. Dronco 2. Kradenan 3. Pajimatan 4. Banyusumurup 5. Tegalrejo
Karangtalun	1. Karangtalun 2. Setran 3. Bandungan 4. Sareyan 5. Salaman

Sumber: Kecamatan Imogiri dalam angka, 2018

Toponim nama Kecamatan Imogiri dapat dicermati dari akar katanya, yakni “*hima*” dan “*giri*”. Peneliti bahasa Jawa, Poerwadarminta, dalam pustaka *Kawi-Jarwa* (1943) mengemukakan *hima* berarti salju, mēndhung. Sedangkan pekamus Dirjasupraba tahun 1931 menyusun buku *Kawi-Jarwa* mengatakan “*ima*” artinya mega. Sementara itu, tahun 1939 Poerwadarminta melalui *Bausastra Jawa* mendokumentasikan istilah “*giri*” yang berarti gunung. Dari dua makna ini, dapat diinterpretasikan nama *Imogiri* merujuk pada gejala alam, yaitu gunung yang menjulang terlihat diselimuti mendung atau mega. Namun ditelisik mendalam kultur Jawa yang penuh simbol dan pasemon, “mendung” ini bisa diartikan kesedihan hati manusia. Benar adanya, gunung tersebut menjadi tempat peristirahatan terakhir Sultan Agung bersama keturunannya. Orang yang ditinggalkan tentu saja bersedih tatkala melihat gunung atau perbukitan yang tinggi itu.

Lazim dalam kekuasaan Jawa bahwa pucuk gunung menjadi pilihan utama petinggi kerajaan untuk area makam. Peralnya, gunung yang tinggi dipercaya makin mendekatkan orang yang dikubur dengan Tuhan. Hidup tradisi lisan di Bantul bahwa pemilihan perbukitan untuk membangun makam raja punya cerita historis. Tatkala Sultan Agung tengah mencari tanah yang hendak digunakan untuk tempat pemakaman khusus raja bersama keluarganya, beliau melemparkan segenggap pasir dari Arab. Pasir ini dilempar jauh sampai mendarat di perbukitan Imogiri. Atas dasar itulah Sultan Agung menentukan membangun makam raja di Imogiri. Tahun 1632, kompleks makam Imogiri mulai dibangun dengan diarsiteki Kyai Tumenggung Tjitrokoesoemo. Selang 13 tahun kemudian, tepatnya tahun 1645 Sultan Agung tutup usia dan dimakamkan di Imogiri.



Gambar 5.11. Komplek Makam Imogiri. Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Terminologi Imogiri dalam konteks ruang dan waktu terus terawat dalam memori kolektif maupun sumber tertulis. Seperti yang diberitakan majalah *Kajawèn* edisi Maret 1939 perihal kahanan dan aturan di Imogiri:

*Gambar-gambar punika kadamêl nalika layon dalêm dumugi ing **Imogiri**. Gambar nginggil, punika nalika layon dalêm dumugi capuri kadhaton. Têtayang kathah ingkang sami ningali, punika wontên sawawining puri kadhaton, sasampunipun dumugi ngriku botên kenging lajêng, kajawi para abdi dalêm ingkang anggantung lampah mangangge prajuritan utawi mangangge jangkêp kados tatanipun tiyang malêbêt ing kadhaton. Dununging pasarean wontên pucaking rêdi **Imogiri**, saha ing ngriku dipun wastani kadhaton dalêm Sampeyan Dalêm Inkang Sinuhun Inkang Minulya saha Inkang Wicaksana Kangjêng Susuhunan Pakubuwana ingkang kaping X, ugi wontên ingkang nyêkak Pakubuwanan X.*

Terjemahan bebasnya: Seluruh gambar itu dibuat tatkala jenazah raja tiba di Imogiri. Gambar yang di atas saat jenazah sampai di cempuri atau bagian inti di dalam istana. Orang-orang melihat dari luar cempuri. Sesampainya jenazah di situ, mereka tidak boleh mendahului, kecuali abdi dalem yang ditugasi memimpin perjalanan berbusana prajurit atau pakaian lengkap seperti aturan orang hendak masuk ke keraton. Letak kuburan di puncak gunung Imogiri, di situ dikenal pula sebagai keraton PB X.

Ternyata pujangga ternama Radèn Ngabèi Rônggawarsita pernah bertandang ke Imogiri. Fakta itu terekam dalam *Babad Rônggawarsita* (1931):

Layonipun Gusti Panêmbahan karêrmakên wontên ing dalêm sadalu, manggèn wontên satêngahing dalêm, dipun tahlilakên abdi dalêm ngulama

ngantos sadalu muput, enjingipun lajêng kabidhalakên sumare ing astana dalêm Imogiri, dhawuh dalêm abdi dalêm wadana kaliwon kadipatèn anom sadaya, sami kadhawuhan andhèrèkakên dumugi ing Imogiri, abdi dalêm panèwu mantri lurah bèkêl jajar, saha abdi dalêm riya panjiranan gindês sakarèrèhanipun, ingkang sapalih kadhawuhan andhèrèkakên dhumatêng ing Imogiri, Radèn Ngabèi Rônggawarsita ugi tumut.

Terjemahan bebasnya: Jenasah Gusti Panembahan diinapkan di rumah semalam. Tempatnya di tengah rumah. Digelar tahlil oleh abdi dalem ulama hingga semalam suntuk. Paginya, jenasah dibawa ke makam Imogiri. Diperintahkan abdi dalem wadana kliwon kadipaten anom turut mengiringi sampai ke Imogiri. Sebagian abdi dalem panewu, mantri lurah, bekel, jajar, dan abdi dalem riya diminta ikut menyertai ke Imogiri. Raden Ngabehi Ranggawarsita juga ikut.

Pustaka *Almanak* (1911) menyebutkan kepala distrik Imogiri (Ngimagiri), yakni Radèn Panji Jayapanular. Atas perintah petinggi keraton, ia membawahi mantri pulisi Ngabèi Jayasêkarta yang ditugasi menjaga daerah Singasarèn, dan Ngabèi Jayakariya yang mengawasi masyarakat daerah Tunggalan. Dari paparan keterangan di atas, ketenaran nama Imogiri tidak hanya tercakup di Kabupaten Bantul, namun mampu melintasi sekat wilayah administratif Yogyakarta. Juga bukan hanya saat bulan Ruwah atau Sura pengunjung dari luar Bantul berbondong-bondong ke Imogiri untuk wisata sejarah dan wisata budaya religi.

5.10 Kecamatan Piyungan



Gambar 5.12. Kantor Kecamatan Piyungan
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Piyungan yang awalnya memiliki 8 kalurahan berubah menjadi 2 kalurahan saja, yaitu (1) Kalurahan Sitimulyo menggabungkan Cepakjajar, Ngablak, Madugondo, dan Majasari; (2) Kalurahan Srimulyo menggabungkan Sandeyan, Pajak, Bintaran, dan Jolosutro; (3) Srimartani menggabungkan Daraman, Petir, dan Gedongan. Komposisi desa yang berjumlah tiga di kecamatan Piyungan tersebut masih bertahan hingga saat ini.

Tabel 5.10. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Piyungan

Desa	Dusun
Sitimulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Babatan 2. Karanganom 3. Karangtengah 4. Mojosari 5. Karangplosos 6. Nglengis 7. Madugondo 8. Somokaton 9. Monggang 10. Karanggayam 11. Kunden 12. Cepokojajar 13. Padangan 14. Ngampon 15. Pagergunung I 16. Pagergunung II 17. Nganyang 18. Banyak I 19. Banyak II 20. Banyak III 21. Ngablak
Srimulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangkel 2. Klenggotan 3. Payak Cilik 4. Payak Tengah 5. Payak Wetan 6. Onggopatran 7. Kabregan 8. Sandeyan 9. Plesedan 10. Duwet Gentong 11. Ngijo 12. Jombor 13. Bintaran Kulon 14. Bintaran Wetan

Desa	Dusun
	15. Cikal 16. Kradenan 17. Jolosutro 18. Prayan 19. Ngelosari 20. Jasem 21. Padeyan 22. Kaligatuk
Srimartani	1. Mandungan 2. Piyungan 3. Pos Piyungan 4. Wanujoyo Lor 5. Wanujoyo Kidul 6. Munggur 7. Mutihan 8. Daraman 9. Kwasen 10. Mojosari 11. Kembangsari 12. Petir 13. Sanansari 14. Bulusari 15. Rejosari 16. Kemloko 17. Umbulsari

Sumber: Kecamatan Piyungan dalam angka, 2018

Merujuk tradisi lisan yang lestari dalam masyarakat Bantul, muasal kata Kecamatan Piyungan berkaitan dengan sejarah Sunan Geseng. Dari hasil penggalian sejarah lisan pelaku budaya Jalasutra, Jarwo didukung keterangan juru kunci makam Sunan Geseng mengatakan, Piyungan berasal dari kata “*Pinayungan*” yang mengandung maksud dilindungi. Penduduk yang tinggal di kawasan ini pada abad XVII terasa dilindungi oleh kehadiran Sunan Geseng yang dikenal sebagai alim-ulama nan sakti. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Geseng usai digembleng Sunan Kalijaga ditugasi berkelana untuk syiar agama Islam di Jawa bagian selatan, sebelum akhirnya dimakamkan di Desa Srimulyo. Sunan Geseng singgah dan memberi “*pinayungan*” dengan segenap kemampuan yang dipunyainya. Banyak pengikut Sunan Geseng yang merasa senang dan mengembangkan ajarannya. Lantas, kemudian hari masyarakat lokal melafalkan pinayungan dengan kata piyungan untuk menyebut daerah yang disinggahi sang aulia itu.

Ada versi lain yang mengatakan Piyungan dari kata “*mayung*”, yang menurut kamus *Bausastra Indonesia-Jawi* (1939) artinya *iwak segara* (ikan laut). Sampai tahun 1895, buku *Almanak* masih menulis nama Piyungan dalam konteks wilayah administratif. Di bawah kendali kepala dhistrik di Prambanan bernama

Radèn Panji Mangunpramuja, Piyungan diatur oleh mantri pulisi Ngabèi Mangunprawira yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk pemajuan bidang keamanan dan sosial di area Piyungan.

Mencermati kehidupan masyarakat petani di Piyungan, tempo dulu mereka mengakrabi tanaman padi dan tembakau. Fakta historis ini terpacak dalam majalah *Kajawen* edisi Desember 1935 yang menurunkan berita berjudul “Kabudidayan Wanujaya nanêm rami”: *Ing sapunika kabudidayan sata Wanujaya, Piyungan, Ngayogya, botên nanêm sata malih, adamêl cobèn-cobèn nanêm rami, cacah wolung bau. Kajawi punika ugi wontên ingkang dipun tanêmi pantun, sarana malihakên.*” Terjemahan bebasnya: Sekarang ini, di Wanujaya, Piyungan, Ngayogya tidak menanam tembakau lagi. Mencoba menanam rami, jumlahnya 8 bau. Selain itu, ada juga yang ditanami padi untuk menggantikan.

5.11 Kecamatan Pleret



Gambar 5.13. Kantor Kecamatan Pleret
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Dalam Maktumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Pleret merupakan sebuah Kalurahan yang berada dalam Kapanewon Gondowulung, bersama desa-desa yang lain yaitu Wonokromo, Tamanan, Wirokerten, Jambidan, dan Pataran. Pada saat itu, Pleret menggabungkan 3 kalurahan yaitu Bambangrejo, Balerejo, dan Tambakrejo. Berdasarkan Surat Keputusan DPR DIY Nomor 18/K/DPR/1955 dan dituangkan dalam PERDA DIY Nomor 1 tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas dan nama kapanewon-kapanewon Imogiri, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul. Dalam rangka menambah kelancaran dan efisiensi pemerintahan lima kapanewon [Imogiri (ska), Imogiri (Yk), Kotagede (ska), Kotagede (yk), Gondowulung] dijadikan empat kapanewon yakni Imogiri, Dlingo, Banguntapan, Pleret. Sejak saat itu, Pleret tidak lagi hanya menjadi sebuah

Kalurahan tetapi menjadi Kapanewon atau Kecamatan dengan meliputi desa-desa sebagai berikut: Desa Wonolelo, Bawuran, Pleret, Wonokromo, dan Segoroyoso.

Tabel 5.11. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Pleret

Desa	Dusun
Pleret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunungan 2. Trayeman 3. Kauman 4. Gunungkelir 5. Kedaton 6. Pungkuran 7. Karet 8. Kerto 9. Kanggotan 10. Bedukan 11. Keputren
Wonokromo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pandes I 2. Pandes II 3. Jejeran I 4. Jejeran II 5. Wonokromo I 6. Wonokromo II 7. Brajan 8. Karanganom 9. Ketonggo 10. Jati 11. Demangan 12. Sareyan
Segoroyoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Srumbung 2. Jembangan 3. Kloron 4. Segoroyoso I 5. Segoroyoso II 6. Trukan 7. Dahromo I 8. Dahromo II 9. Karanggayam
Bawuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegalrejo 2. Bawuran I 3. Bawuran II 4. Jambon 5. Kedungpring 6. Sentulrejo 7. Sanan
Wonolelo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedungrejo 2. Cegokan 3. Majasari

Desa	Dusun
	4. Depok
	5. Guyangan
	6. Ploso
	7. Purworejo
	8. Bojong

Sumber: Kecamatan Pleret dalam angka, 2018

Asal-usul nama Kecamatan Pleret terdapat dua versi. Merujuk keterangan *Javanese-English Dictionary* (1974), **pleret** diartikan sebagai sesuatu yang mendadak (gejala alam berupa sinar). Contoh kalimatnya, *mau esuk srêngengene mêtù, mbasan awan mak pleret mëndhung*. Tadi pagi mentari keluar, tapi siangnya tiba-tiba mendung. Versi kedua yang logis adalah **pleret** merupakan jenis *isen-isen* (isi) minuman gempol. Sumber yang lebih tua, *Serat Centini* (1814-1823) melukiskan keakraban wong Jawa dengan hidangan gempol pleret: Sêmpurna lêmèt pasung, gantal lêm pêr lan sêmar-tinandhu, **plèrèt** gêm pol apan kopyor rujak kawis, clorot jênang pathi sagu, juwadah lan jênang dodol. Dari segi pengucapan, pelafalan **Pleret** memang tepat merujuk pada makanan. Maka, bisa dipercaya bahwa daerah ini dulu dikenal memproduksi **pleret** untuk campuran gempol. Artinya, penciptaan nama tidak bertemali dengan kekuasaan maupun tokoh yang tinggal.

Padmasusastra dalam *Bauwarna* (1898) menuliskan: *lêmpitan kaya plèrèt, kagodhog kanggo iwak monjit*. Pada halaman lain, Padmasusastra menderetkan aneka kuliner lokal, antara lain gêm pol **plèrèt**, mêniran, mëndut, muntên, madusirat, gandhos, gandhos wingka, gandhos gimbal, garu, grontol, grubi, gèti, glali, gèplak, gipang, gêmblong, gablog, gèblèg, gèthuk, ganggèng kanyut, bantalan, brondong, brêm, bikang. Wirapustaka dan Rêksadipraja melalui pustaka *Waradarma* tahun 1916 juga menyuratkan keterangan perihal makanan pleret: *mantri nènêm sami nêdha gêm pol plèrèt, anyêl, sabab punapa brahmana, wasiya, sudra. Purija botên dipun cuwil-cuwil pisan, ora enjuh*.

Nama Pleret ternyata dijumpai pula sebagai nama pusaka raja. *Serat Tanaja* mengisahkan: *Iki tumbak sajugu/ dhapur sangkuh saujata/ Kyai Plèrèt watanipun/ tèmbe pusakaning nata*. Terjemahan bebasnya Ini tombak satu warna dengan mata sangkur. Disebut senjata Kyai Pleret yang menjadi pusaka milik raja. Sementara itu, *Babad Tanah Jawi* memuat keterangan tak kalah menarik:

Timbalanira ing nguni/ Jêng Susunan Kalijaga/ ingkang misik marang ingon/ Ki Mangir gégamanira/ nora kêna tinulak/ singa kang katiban lampus/ tur cinêtha iku tumbak/ / dadi pusakaning aji/ lawan Kyai Plèrèt kêmbat/ iku ing tèmbe ngakire/ marmane lamun sêmbada/ kang rêmpit ing rêhira/ binujuk sangkaning alus/ yèn tumbake uwis kêna.

Terjemahan bebasnya: Membawa pesan Kanjeng Sunan Kalijaga yang membisiki Ki Mangir untuk membuat senjata. Perintah ini tidak bisa

ditolak, bagaikan singa yang bakal mati, ditombak dengan Kyai Pleret kembar. Maka, di kemudian hari perintah itu sukar dipenuhi meski dibujuk secara halus bila tidak tumbak itu sudah ditusukkan

Sebagai suatu kawasan historis, Pleret tentunya terkenal sejak periode Mataram Islam awal. Mislanya, *Babad Mataram* mengungkapkan relasi kekuasaan di Pleret:

Sri narendra karsa animbali/ mring kang rayi Jêng Sunan Ngalaga/ ingkang ngadhaton ing Plèrèt/ duta umangkat sampun/ tan kawarna duta narpati/ gènti kang kawuwusa/ kang umadêg ratu/ kang ngrêbat pura Mataram/ Jêng Sinuhun Ngalaga lagya tinangkil/ andhèr kang wadyabala.

Terjemahan bebasnya: Raja hendak memanggil adik Kanjeng Sunan Ngalaga yang bertahta di Pleret. Utusan telah berangkat sebagai duta raja. Ia dilanda gelisahan sebab mendaku sebagai raja dengan merebut Mataram. Kanjeng Sinuhun Ngalaga sedang menghadap raja, dan terlihat pasukan berjejer

5.12 Kecamatan Kasihan



Gambar 5.14. Kantor Kecamatan Kasihan
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Kasihan yang awalnya memiliki 14 kalurahan berubah menjadi 4 kalurahan saja, yaitu (1) Kalurahan Tirtonirmolo meliputi Bekelan, Padokan, dan Mrisi; (2) Kalurahan Ngestiharjo meliputi Kembang, Sutopadan, Nitipuran, dan Onggobayan; (3) Kalurahan Tamantirto meliputi Ngebel, Sumberan, dan Kasihan;

(4) Kalurahan Bangunjiwo meliputi Kasongan, Bangen, Sribitan, dan Paitan. Sampai dengan saat ini kecamatan Kasihan masih melingkupi 4 desa tersebut.

Tabel 5.12. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Kasihan

Desa	Dusun
Bangunjiwo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gendeng 2. Ngentak 3. Donotirto 4. Lemahdadi 5. Salakan 6. Sambikerep 7. Petung 8. Kenalan 9. Sribitan 10. Kalirandu 11. Bangen 12. Bibis 13. Jipangan 14. Kalangan 15. Kalipucang 16. Gedongan 17. Kasongan 18. Tirto 19. Sembungan
Tirtonirmolo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalipakis 2. Kersan 3. Jeblog 4. Plurugan 5. Padokan Lor 6. Padokan Kidul 7. Dongkelan 8. Jogonalan Lor 9. Jogonalan Kidul 10. Glondong 11. Mrisi 12. Beton
Tamantirto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geblagan 2. Gatak 3. Ngebel 4. Ngrame 5. Jetis 6. Jadan 7. Brajan 8. Gonjen 9. Kasihan 10. Kembaran

Desa	Dusun
Ngestiharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambak 2. Sumberan 3. Soragan 4. Cungkuk 5. Kadipiro 6. Sonosewu 7. Jomegatan 8. Janten 9. Sonopakis Lor 10. Sonopakis Kidul 11. Onggobayan 12. Sidorejo

Sumber: Kecamatan Kasihan dalam angka, 2018

Sejarah nama Kecamatan Kasihan dapat ditelusuri dalam kamus *Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun* yang disusun Wintêr (1928). Terminologi “*kasihan*” artinya *kawêlasan, pasihan, wêlas, sih, kawêlas asih*. Lebih jelas lagi dalam Bausastra Indonesia-Jawi yang dikarang Purwadarminta (1939) menyurat lema “*kasih*” (Ind) : (-akan) trêсна ut. asih marang; 2 (-sayang) wêlas-asih; 3 awèh, wèwèh; terima kasih: nuwun; minta kasih: njaluk pangapura; kekasih: kêkasih; berkasih-kasihan: sih-sinihan, trêсна-tinrêsnan; dikasih: 1 (ut. dikasihi) disih, ditrêsnani; 2 diwènèhi; kasihan: wêlas, mêmêlas, mêsakake; dikasihani: diwêlasi

Dari sejumlah keterangan kamus di muka, analisa historisnya daerah Kasihan di masa silam didapati kondisi warganya yang susah sehingga perlu dikasihani. Argumentasi ini masuk akal dengan menyimak catatan lama *Babad Dêmak* (1914) yang secara gamblang menyebut Kasihan untuk nama tokoh:

Yuswane Rara Kasihan / nênggih lagya têlung sasi / dipun êmban ingkang rama / marêngi nangis kapati / sinusulakên nuli / niring kang ibu sang rêtna yu / sang rêtna lagya adang / tan wontên rowangnya malih / kêtanggungan kang putra nuju bobotan.

Terjemahan bebasnya: Umur Rara Kasihan baru 3 bulan, diasuh oleh ayahnya dan menangis demikian keras. Lantas, bayi itu disusulkan kepada ibunya yang sedang menanak nasi tanpa teman. Ditambah anaknya kebetulan tengah buang air besar.

Begitu pula dalam pustaka *Pustakaraja Purwa* anggitan Padmasusastra (1935) dikisahkan:

Awasta pun Jaka Lagna, adhi kawula èstri awasta pun Rara Lagni, sami sutane Rôndha Kasihan ing Parêmbasan, mila ngantos anglampahi dados duratmaka, saking susahipun ing manah pun biyung Rôndha Kasihan

sampun jompo adhi kawula èstri pun Lagni sakit labêt saking enggal-enggal kaluwèn.

Terjemahan bebasnya: Jaka Lagna adalah adik dari Rara Lagni. Mereka merupakan buah hati janda Kasihan di Parembasan. Nekad menjadi pencuri lantaran di saat ibunya janda Kasihan sudah sepuh itu mengalami penderitaan, Rara Lagni didera sakit parah gara-gara sering kelaparan.

Dalam konteks ruang administratif, daerah Kasihan kian terkenal dalam peta gerilya perang kemerdekaan. *Serat Nayaka Lélana* yang ditulis Wiryadikuswanda (1955) menjelaskan perjalanan menteri berkelana melewati Kasihan untuk menghindari pengejaran tentara Belanda yang hendak merebut kemerdekaan Indonesia. Berikut ini kisahnya:

Kalih minggu nyare Nagasari/ pra lélana nuntèn sami bidhay/ miring Kasihan lumarise/ kampir wisma Pak Ranu/ ing Tulakan markasirèki/ sinêgah dhahar siyang/ kikir lawuhipun/ jam lima praptèng Kasihan/ wisma guru ingkang sami dèn inêpi/ Pak Jumaah arannya.

Terjemahan bebasnya: Dua minggu tidur di Nagasari. Para gerilyawan melanjutkan perjalanan menuju Kasihan. Mereka mampir ke rumah Pak Ranu di Tulakan, lantas dijamu makan siang berlauk kikir. Pukul lima sore mereka telah tiba di Kasihan, dan menginap di rumah Pak Jumaah yang bekerja sebagai guru.

5.13 Kecamatan Sewon



Gambar 5.15. Kantor Kecamatan Sewon
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Sewon yang awalnya memiliki 17 kalurahan berubah menjadi 4 kalurahan saja. Kapanewon Sewon terdiri dari: (1)Kalurahan Timbulharjo menggabungkan Rendeng, Dadapan, Sudimoro, Kowen, dan Kepek; (2)Kalurahan Bangunharjo menggabungkan Saman, Wojo, Ngoto, dan Jurug; (3)Kalurahan Panggunharjo menggabungkan Cabeyan, Prancak dan Krapyak; (4)Kalurahan Pandowoharjo menggabungkan Pandowo, Karanggede, Krantil, Bandung, dan Ngrukem. Sampai dengan saat ini, jumlah dan nama desa di Kecamatan Sewon masih tetap sama dengan yang ada pada tahun 1948 tersebut.

Tabel 5.13. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Sewon

Desa	Dusun
Pendowoharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dagen 2. Cepit 3. Sawahan 4. Krandoan 5. Ngimbang 6. Miri 7. Bandung 8. Ngaglik 9. Monggang 10. Kaliputih 11. Blunyahan 12. Pucung 13. Diro 14. Rogoitan 15. Banyon 16. Pendowo
Timbulharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dadapan 2. Tembi 3. Gatak 4. Balong 5. Gabusan 6. Dagan 7. Sewon 8. Mriyan 9. Kowen I 10. Kowen II 11. Dobalan 12. Sudimoro 13. Bibis 14. Ngasem 15. Kepek 16. Ngentak

Desa	Dusun
Bangunharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jotawang 2. Salakan 3. Randubelang 4. Wojo 5. Tanjung 6. Saman 7. Druwo 8. Tarudan 9. Ngoto 10. Pandeyan 11. Bakung 12. Semail 13. Mredo 14. Gatak 15. Widoro 16. Jurug 17. Demangan
Panggungharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garon 2. Cabean 3. Ngireng-ireng 4. Geneng 5. Jaranan 6. Glondong 7. Pandes 8. Sawit 9. Kweni 10. Pelemsewu 11. Glugo 12. Dongkelan 13. Krapyak Kulon 14. Krapyak Wetan

Sumber: Kecamatan Sewon dalam angka, 2018

Mengutip penjelasan Sartono K (2013), muasal nama Kecamatan Sewon sukar dipisahkan dari keberadaan Syeh Sewu yang pernah singgah serta *babad alas* di wilayah ini. Menurut tradisi lisan, nama Sewon diambilkan dari nama Syeh Sewu yang dikenal sebagai penyebar agama Islam. Terdapat sepenggal kisah yang menyatakan bahwa Syeh Sewu merupakan orang yang berasal dari tanah Arab yang bertandang ke pulau Jawa. Ia bersama Syeh Maulana Maghribi, Syeh Belabelu, dan Syeh Damiaking getol syiar agama Islam di telatah Jawa. Tujuan pertama ketiga syeh itu, yaitu wilayah Pantai Selatan Pulau Jawa, khususnya di kawasan Pantai Parangtritis, Parangkusuma, Karangbolong, dan Bantul pada umumnya. Namun Syeh Sewu meninggal di sebuah dusun yang sekarang dinamakan Dusun Sewon. Sementara dijumpai versi lain yang menjelaskan Syeh Sewu adalah pelarian dari Majapahit yang menetap dan tutup usia di Dusun Sewon.

Hingga kini, makam Syeh Sewu sebagai cikal bakal dusun (lalu Kecamatan Sewon) masih terawat dengan baik. Hanya saja, makam Syeh Sewu tidak berbatu nisan. Menurut Hisham Anwar (73) selaku salah satu pengurus atau sesepuh Masjid Syeh Sewu, tiadanya nisan ini memang disengaja. Semasa hidup Syeh Sewu berpesan kepada warga setempat jika kelak dirinya meninggal, kuburannya tidak perlu diberi nisan.

Terdapat pula makam tokoh lain yang tidak jauh dari makam Syeh Sewu, yaitu makam Tumenggung Ranadigdaya dan Nyai Sedah Mirah. Merujuk folklore, kedua tokoh itu adalah punggawa Kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Disebutkan, salah satu keturunan Tumenggung Ranadigdaya diperistri Sultan Hamengku Buwana. Salah satu peninggalan Syeh Sewu yang sampai sekarang masih terlestarikan di Sewon berupa bangunan masjid yang diberi nama Masjid Syeh Sewu. Masjid itu hingga kini terawat baik dan dipakai untuk sembahyang penduduk setempat.

Periode kerajaan, menurut Almanak tahun 1890, Distrik Sewon dipegang oleh Mas Panji Jayadiwirya yang membawahi mantri pulisi Dhukuh (Ngabèi Jayasuwôngsa), Bakulan (Ngabèi Jayasêpônca), dan Kapurancak (Ngabèi Jayawiyana). Seiring perjalanan waktu, di Sewon berdiri kantor *onder district* atau asistenan wedana yang dinamakan Keasistenan Wedanan Sewon. Kantor Kawedanan tersebut pernah pula dipindahkan ke Dusun Cabeyan, lalu ke Dusun Dadapan. Dari Dusun Dadapan berpindah lagi ke Dusun Cabeyan. Dari Cabeyan ini lantas digeser ke Ngijo (Kantor Kecamatan Sewon sekarang). Kecamatan Sewon dewasa ini memayungi Kalurahan Panggunharjo, Timbulharjo, dan Pendowoharjo.

5.14 Kecamatan Banguntapan



Gambar 5.16. Kantor Kecamatan Banguntapan
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Menurut Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Banguntapan adalah sebuah Kalurahan yang menggabungkan Kalurahan lama yaitu Sorowajan, Ketandan, Pilihan, dan Pringgolayan. Kalurahan Banguntapan menjadi bagian dari Kapanewon (Kecamatan) Kotagede berbarengan dengan 2 kalurahan yang lain yaitu Baturetno dan Umbulharjo.

Tabel 5.14. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Banguntapan

Desa	Dusun
Banguntapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegal Tandan 2. Jaranan 3. Jomblangan 4. Wonocatur 5. Karangjambe 6. Karangbendo 7. Sorowajan 8. Plumbon 9. Pelemwulung 10. Pringgolayan 11. Modalan
Baturetno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelem 2. Mantup 3. Kalangan 4. Wiyor 5. Giang 6. Ngipik 7. Plakaran 8. Manggisari
Jagalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sayangan 2. Bodon
Singosaren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Singosaren I 2. Singosaren II 3. Singosaren III
Jambidan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ponegaran 2. Bintaran 3. Joho 4. Dhuku 5. Kretek 6. Pamotan 7. Combongan
Potorono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potorono 2. Salakan 3. Prangwedanan 4. Condrowangsan 5. Nglaren 6. Mertosanan Wetan

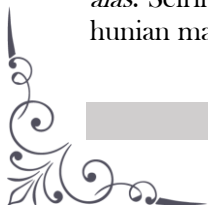


Desa	Dusun
	7. Mertosanan Kulon 8. Balong lor 9. Banjardadap
Tamanan	1. Kragilan 2. Tamanan 3. Kauman 4. Krobokan 5. Nglebeng 6. Grojogan 7. Glagah Lor 8. Glagah Kidul 9. Sokowaten
Wirokerten	1. Grojogan 2. Botokenceng 3. Sampangan 4. Tobratan 5. Kepuh Wetan 6. Kepuh Kulon 7. Kertopaten 8. Mutihan

Sumber: Kecamatan Banguntapan dalam angka, 2018

Tahun 1955, muncul Surat Keputusan DPR DIY Nomor 18/K/DPR/1955 dan dituangkan dalam PERDA DIY Nomor 1 tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas dan nama kapanewon-kapanewon Imogiri, Gondowulung dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul. Dalam rangka menambah kelancaran dan efisiensi pemerintahan Lima kapanewon (Imogiri (ska), Imogiri (Yk), Kotagede (ska), Kotagede (yk), Gondowulung tersebut dijadikan empat kapanewon yakni Imogiri, Dlingo, Banguntapan, Pleret. Sejak saat itu, Banguntapan tidak lagi hanya menjadi sebuah Kalurahan tetapi menjadi Kapanewon atau Kecamatan dengan meliputi desa-desa sebagai berikut: Desa Banguntapan, Baturetno, Singosaren, Jagalan, Tamanan, Wirokerten, Potorono, dan Jambidan. Komposisi tersebut bertahan hingga sekarang.

Asal-usul nama Banguntapan bertemali dengan pembesar kerajaan Kasultanan Yogyakarta. Dikisahkan, tahun 1797 daerah ini dibangun oleh Sinuwun Banguntapa atau Sultan Hamengku Buwana II dengan nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun. Selepas ada penggabungan kalurahan, nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun dicomot sebagai nama kalurahan di wilayah Kota Madya Yogyakarta. Sementara kalurahan yang masuk di area Kabupaten Bantul dinamai kalurahan (kemudian menjadi kecamatan) Banguntapan guna menghormati dan mengenang raja Hamengku Buwana II yang melakukan *babad alas*. Seiring perkembangan zaman, daerah Banguntapan bertambah ramai untuk hunian masyarakat.



Merujuk akar katanya, Banguntapan berasal dari kata “*bangun*” dan “*tapa*”. Menurut penjelasan *Bausastra Jawa* anggitan Poerwadarminta (1939) terminologi bangun mengandung arti: *tangi, gumregah; wayah esuk kira-kira jam 4-5; yasa, ngêdêgake omah lsp; ndandani*. Sedangkan “*tapa*” artinya bertapa. Dari keterangan makna ini selaras dengan tradisi lisan bahwa Sultan Hamengku Buwana II membangun (*yasa, ngêdêgake omah*) hunian yang dilambiri dengan kegiatan bertapa. Maklum jika orang Jawa klasik ketika hendak mendirikan rumah, pasti disertai bertapa atau meditasi agar diberi kelancaran hingga pelaksanaan proyek pembangunan selesai dikerjakan.

Orang Bantul klasik yang sehari-hari menikmati pertunjukan wayang kulit tentu mendengar istilah “*banguntapa*” dalam konteks ritual. Sebagai contoh, dalam dunia pewayangan Mahabharata (1924) dikisahkan: *Maharêsi Naradha lajêng nyariyosakên lêlampahanipun Karna, ing nalika botên katampi dening Drona, prakawis anggènipun puruhita anandukakên bramastra, amargi Karna sanès brahmana, saha sanès satriya ingkang banguntapa*. Terjemahan bebasnya: Maharesi Narada kemudian menceritakan perjalanan Karna. Ketika tidak diterima guru Durna, lantaran Karna bukanlah brahmana, juga bukan satriya yang banguntapa.

Sebetulnya, nama Banguntapan populer dalam sejarah pembesar kerajaan Mataram Islam. Semisal, Sunan Paku Buwana VI yang diasingkan ke Ambon hingga meninggal dunia di sana dan dijuluki Sunan Banguntapa. *Almanak* (1859) merekam cerita: *Kanjêng Susuhunan Pakubuwana Ingkang Kaping VI, kala ing taun Jimawal, ôngka: 1757: taun Wêlandi: 1830, anilar kaprabon têrang saking kanjêng gupêrmèn, lajêng pindhah dhatêng pulo Ambon. Mila lajêng kasêbut nama Sunan Banguntapa, inggih surud wontên ing ngriku*. Terjemahan bebasnya: Kanjeng Paku Buwana VI pada tahun Jimawal, ôngka: 1757: tahun 1830 Masehi meninggalkan kerajaan atas permintaan tuan Gubernur, lalu pindah ke pulau Ambon. Sebab itu, diberi nama Sunan Banguntapa, karena meninggal di situ. Demikianlah, istilah *Banguntapan* memantulkan laku hidup atau aktivitas penting seorang tokoh terkemuka.

5.15 Kecamatan Sedayu



Gambar 5.17. Kantor Kecamatan Sedayu
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Kapanewon (Kecamatan) Sedayu atau dalam istilah dulu disebut Kapanewon Pedes yang awalnya memiliki 12 kalurahan berubah menjadi 4 kalurahan saja, yaitu (1)Kalurahan Argomulyo meliputi Watu, Kaliberet, Pedes, dan Kemusuk; (2)Kalurahan Argosari meliputi Sedayu, Klengen, dan Tonalan; (3.)Kalurahan Argorejo meliputi Ngentak, dan Sundikidul; (4)Kalurahan Argodadi meliputi Sungapan, Sukoharjo, dan Dingkikan. Komposisi kecamatan Sedayu masih tetap sama sampai dengan saat ini yaitu terdiri dari 4 desa tersebut di atas.

Tabel 5.15. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Sedayu

Desa	Dusun
Argodadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dumpuh 2. Dingkikan 3. Ngepek 4. Cawan 5. Bakal 6. Demangan 7. Bakal Dukuh 8. Sukohardjo 9. Sumberan 10. Selogedong 11. Sungapan Dukuh 12. Sungapan 13. Kadibeso 14. Brongkol



Desa	Dusun
Argorejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalakan 2. Semampir 3. Kepuhan 4. Polaman 5. Senowo 6. Gunungpolo 7. Sundikidul 8. Bandut Lor 9. Bandut Kidul 10. Metes 11. Pendul 12. Pereng wetan 13. Ngentak
Argosari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalijoho 2. Klangen 3. Tapen 4. Botokan 5. Gunung Mojo 6. Jambon 7. Tonalan 8. Gayam 9. Jaten 10. Jurug 11. Gubug 12. Sedayu 13. Pedusan
Argomulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puluhan 2. Kemusuk Lor 3. Kemusuk Kidul 4. Srontakan 5. Samben 6. Sengon karang 7. Watu 8. Panggang 9. Karanglo 10. Pedes 11. Plawonan 12. Surobayan 13. Kaliurang 14. Kaliberot

Sumber: Kecamatan Sedayu dalam angka, 2018

Asal nama Kecamatan Sedayu ditafsirkan berkaitan dengan tokoh lokal yang terkenal periode kerajaan Mataram Islam. Dalam *Babad Tanah Jawi* dikisahkan nama Ronggo Sedayu yang terlibat pertempuran dengan kumpeni:



Kunêng wadya Mèkasar kang ngantêp yuda/ sagung wadya Mèntawis/ Dyan Prawiratrana/ sawadya palwanira/ sêdaya wus sami minggir/ miwah palwanya/ pra bupati pasisir// palwa kathah nèng samodra maksih ngambang/ miwah palwa Kumpêni/ maksih sami ngambang/ Rangga Sêdayu prapta/ lan Singawôngsa Ngabèi/ wadya Mèntaram/ sêdaya sampun prapti.

Terjemahan bebasnya: Menahan pasukan Makasar yang begitu semangat berperang. Seluruh prajurit Mentawis, Dyan Prawiratrana bersama pasukannya sudah menepi. Perahu para bupati pesisir banyak mengapung di lautan. Demikian juga perahu milik kompeni terlihat mengapung. Rangga Sedayu datang bersama Singawangsa Ngabehi. Seluruh pasukan Mataram telah tiba

Daerah yang ditempati tokoh tersebut kemudian oleh penduduk lokal dinamakan Sedayu. Nama Sedayu dalam dunia kerajaan tidak hanya dijumpai pada era Mataram Islam. Dalam cerita rakyat yang pernah hidup periode Majapahit mencatat Pangeran Sêdayu meninggal dunia pada Rabu Kliwon, Pangeran Wêlang tutup usia pada Sabtu Wage, dan Pangeran Cindheamoh wafat pada Minggu Wage. Dimaksudkan masyarakat detik itu diharapkan tidak menggelar hajatan bertepatan dengan geblak atau hari meninggalnya para tokoh ini.

Periode perang kemerdekaan Indonesia, Sedayu dalam konteks ruang administratif disebutkan pula. *Nayaka Lêlana* karangan Wirya Adikuswanda (1955) melukiskan: *ing Sêdayu mung saratri/ enjangnya prapta krênggosan/ pêmudha kang martakake/ yèn ing Lungur sampun cêlak/ katon prajurit Lônnda/ kathah wus sami tumurun/ nuju Sêdayu purugnya* | Terjemahan bebasnya: Di Sedayu hanya semalam. Paginya, sampai ngos-ngosan pemuda itu mengabarkan bahwa daerah Lungur sudah dekat, terlihat banyak pasukan Belanda bergerak turun menuju Sedayu sebagai lokasi yang diincar.

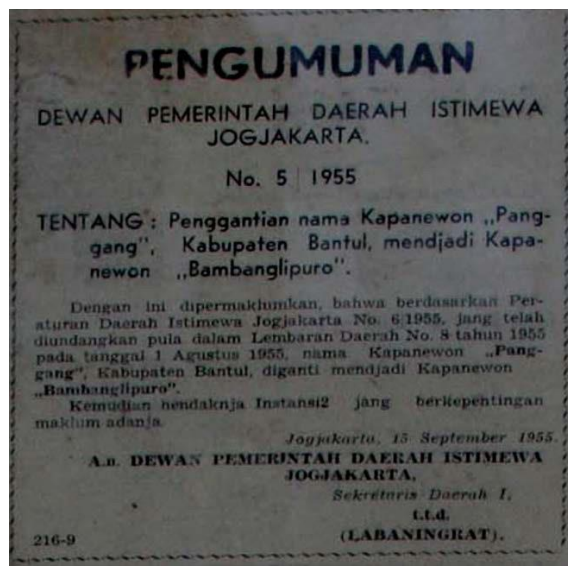
Dengan demikian, Kecamatan Sedayu merupakan salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah Mataram Islam dan awal republik Indonesia. Wajar jika nama Sedayu tercatat dalam lembaran sejarah lokal.

5.16 Kecamatan Bambanglipuro



Gambar 5.18. Kantor Kecamatan Bambanglipuro
Sumber Foto: Tim Peneliti 2019

Menurut Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan Dan Nama-namanya, Bambanglipuro (atau dalam maklumat tersebut disebut Lipuro) adalah sebuah kalurahan lama yang digabung dengan yang lain menjadi Desa Sumbermulyo. Pada awalnya Desa Sumbermulyo, Mulyodadi, dan Sidomulyo berada dalam Kapanewon Panggang. Tetapi sejak tahun 1955, Kecamatan Bambanglipuro menggantikan nama Kapanewon Panggang, dengan pembagian desa yang sama yaitu Sidomulyo, Mulyodadi, dan Sumbermulyo hingga kini.



Gambar 5.19. Pengumuman Pergantian nama Kapanewon Panggang menjadi Kapanewon Bambanglipur. Sumber: Purwanta et al., 2015: hal. 30

Dicermati secara geografis, Kecamatan Bambanglipuro berbatasan dengan Kecamatan Bantul untuk bagian utara; sisi timur bersebelahan dengan Kecamatan Pundong; bagian selatan dijumpai Kecamatan Kretek; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pandak. Menarik mencermati muasal nama Bambanglipuro, yang ditafsirkan bertemali dengan nama orang terkemuka pada masanya.

Tabel 5.16. Daftar Desa dan Dusun di Kecamatan Bambanglipuro

Desa	Dusun
Sidomulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ngajaran 2. Cangkring 3. Palihan 4. Sirat 5. Ngireng-ireng 6. Tempel 7. Prenggan 8. Selo 9. Plematung 10. Plebengan 11. Ponggok 12. Pinggir 13. Turi 14. Glodogan 15. Kuwon
Mulyodadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejing 2. Paker 3. Wonodoro 4. Destan 5. Kraton 6. Bregan 7. Plumutan 8. Cangkring 9. Tulasan 10. Jomblang 11. Ngambah 12. Kepuh 13. Warungpring 14. Carikan
Sumbermulyo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanutan 2. Siten 3. Tangkilan 4. Kutu 5. Kedon 6. Kaligondang 7. Gedogan 8. Gunungan 9. Jogodayoh

Desa	Dusun
	10. Plumbungan
	11. Caben
	12. Samen
	13. Gersik
	14. Bondalem
	15. Kintelan
	16. Cepoko

Sumber: Kecamatan Bambanglipuro dalam angka, 2018

Dalam dimensi Jawa, nama mengandung maksud serta harapan, sehingga orang Jawa tidak sembarangan atau *waton* membubuhkan nama kepada anak atau seseorang. Menurut Poerwadarminta dalam *Bausastra Jawa* (1939), terminologi “*bambang*” berarti *satriya* (nonoman). Sementara dalam pustaka *Têmbung Kawi Mawi Têgêsipun*, Wintêr (1928) menyediakan penjelasan istilah bambang mengandung arti: *jungga, turuning pandhita, mangmang, bingah, abrit*. Sedangkan lema “*lipur*” dalam *Bausastra Indonesia-Jawi* anggitan Purwadarminta (1939) berarti hiburan. Buku *Babasan lan Saloka* (1908) memaknai lipur yang artinya *ical susahipun* (hilang susahinya). Dari sekian makna ini, dapat diketahui Bambang Lipurno ialah satria atau masih keturunan pandhita yang pandai menghibur untuk menghilangkan rasa susah yang membelit hati.

Untuk muasal nama Kecamatan Bambanglipuro, tampaknya dilatarbelakangi oleh tokoh penting bernama Bambang Lipuro yang pernah tinggal di daerah itu pada masa silam. Dipercaya ia bukan orang sembarangan, sehingga masyarakat lokal mengabadikan namanya untuk identitas daerah dan menjaganya dari waktu ke waktu. Lazim dalam paham kekuasaan Jawa, orang yang terhormat lantaran dekat dengan jaringan kekuasaan keraton ataupun pejabat ternama yang menempati kursi birokrasi tradisional kerajaan akan dikenang sebagai nama daerah. Sebagai tokoh terkemuka dan masuk golongan ksatria, menurut tradisi lisan Bambang Lipuro juga menjadi pengayom dan *paranporo* warga sekitar terkait persoalan pokok yang mengemuka di tengah masyarakat, selain menghibur hati masyarakat.

Secara teoritis, pemberian nama wilayah bukan tanpa latar belakang. Masyarakat menamai daerahnya tentu diikuti faktor penyebabnya. Menurut Heri Priyatmoko (2019), model dari penggalian riwayat nama daerah dapat diringkas sebagai berikut: (1) nama orang terkemuka atau terhormat yang menempati daerah itu; (2) nama jabatan dalam struktur birokrasi pemerintahan kerajaan dinasti Mataram Islam; (3) peristiwa penting yang terjadi di daerah itu; (4) keadaan suatu wilayah; (5) aktivitas pokok warga setempat; (6) nama ciptaan baru.

Dalam perkembangan administratif, Kecamatan Bambanglipuro berluas wilayah 22,70 km ini membawahi 3 desa, yakni Sumbermulyo, Sidomulyo, dan Mulyodadi. Kecamatan Bambanglipuro berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatannya berada pada ketinggian 22 meter di atas permukaan laut. Jarak 10

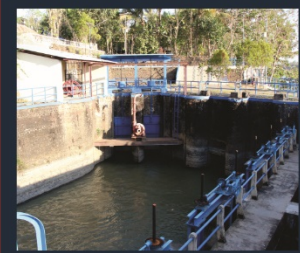


km membentang dari ibukota kecamatan ke pusat pemerintahan Kabupaten Bantul. Dari segi klimatologi, Kecamatan Bambanglipuro beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Bambanglipuro adalah 31°C dengan suhu terendah 23°C. Bentangan wilayah di Kecamatan Bambanglipuro 99,5 % berupa daerah yang datar sampai berombak dan 0,5% berupa daerah yang berombak sampai berbukit.

Data terbaru mengenai populasi penduduk, Kecamatan Bambanglipuro dihuni oleh 9.860 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Bambanglipuro adalah 42.745 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 20.539 orang dan penduduk perempuan 22.206 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Bambanglipuro adalah 1.863 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kecamatan Bambanglipuro adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 13.171 orang atau 30,8 % penduduk Kecamatan Bambanglipuro bekerja di sektor pertanian.



BAB 6 PENUTUP



BAB 6. PENUTUP

Pembentukan Bantul sebagai kabupaten pada tanggal 20 Juli 1831, memiliki hubungan erat dengan konsolidasi wilayah pemerintah Hindia Belanda pasca perang Jawa. Pembentukan kabupaten Bantul diikuti berbagai perkembangan dalam bidang administrasi pemerintahan, bidang perekonomian, dan perubahan sosial masyarakat. Dari Pembentukannya hingga saat ini, kabupaten Bantul dipimpin oleh 31 Bupati (termasuk pejabat sementara). Hingga tahun 1958, terdapat 16 bupati yang kesemuanya merupakan Nayaka Dalem bergelar Raden Tumenggung dan Kanjeng Raden Tumenggung (KRT). Setelahnya, bupati dijabat oleh kalangan nayaka maupun dari kalangan di luar keraton. Tahun 1831 setelah Kabupaten Bantul berdiri, struktur pemerintahan di bawah Bupati masih berupa Kademangan, namun istilahnya diubah menjadi distrik sesuai dengan arahan dari Pemerintahan Belanda. Jumlah distrik berubah-ubah seiring dengan reorganisasi dan konsolidasi wilayah administratif distrik maupun desa-desa. Pada awal kemerdekaan Indonesia, istilah distrik dirubah menjadi kapanewon. Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 menerangkan nama-nama kapanewon (setara kecamatan) dan nama-nama desa. Maklumat tersebut juga menjadi tanda konsolidasi banyak desa menjadi beberapa desa saja setiap kapanewon. Tahun 1957, terdapat 19 (sembilan belas) daerah enclave Surakarta yang masuk menjadi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Bantul yang diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958. Struktur wilayah administratif kabupaten Bantul sejak Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 cenderung sama hingga kini.

Pada abad 19 dan paruh pertama abad 20, pertanian pangan dan perkebunan khususnya tebu menjadi corak utama. Bantul merupakan bagian daerah Vorstenlanden Yogyakarta atau daerah Praja Kejawen hingga tahun 1903, yang dibedakan dengan Gupernemen atau daerah kekuasaan langsung pemerintah Hindia Belanda. Kendati demikian, pada abad 19 kabupaten Bantul tidak luput dari investasi pemerintah Belanda dan swasta asing dalam usaha perkebunan khususnya tebu. Sisa-sisa kejayaan komoditas tebu di Bantul masih dapat dilihat dalam artefak sejarah baik yang masih berfungsi seperti pabrik gula Madu Kismo maupun pabrik-pabrik lain yang sudah berubah bentuk dan fungsi. Perkembangan selanjutnya pada paruh kedua abad 20 hingga sekarang, kabupaten Bantul tetap mengembangkan usaha pertanian di seluruh wilayah. Selain itu, kabupaten Bantul juga mengembangkan industri kreatif berupa kerajinan dan industri yang lain di daerah utara serta mengembangkan pariwisata alam di daerah selatan berupa pantai dan dataran tinggi. Dilihat dari perkembangan tersebut serta deskripsi pemerintahan para bupati pada masing-masing periode, peran Bupati sangat penting dalam perkembangan corak ekonomi kabupaten Bantul sepanjang hampir 2 abad tersebut. Bupati memberikan pelayanan infrastruktur produksi maupun



distribusi dari usaha-usaha ekonomi pertanian, perkebunan, maupun industri kreatif. Selain peran Bupati dan struktur pemerintahan dibawahnya, tentu saja peran masyarakat kabupaten Bantul juga sangat besar dalam membentuk Bantul dari 1831 hingga kini.

Dari penjelasan historis yang kita dapat dalam narasi sejarah dalam buku ini, setidaknya menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, penamaan kecamatan-kecamatan bahkan nama Bantul itu sendiri berasal dari peristiwa sejarah maupun fenomena alam. Kedua, peran Bupati dan struktur pemerintahan di bawahnya dalam pengembangan sosial ekonomi Bantul meliputi fasilitasi infrastruktur pengetahuan, produksi, maupun distribusi serta perlindungan dalam bentuk kebijakan daerah. Ketiga, masyarakat Bantul memadukan pengetahuan dan potensi wilayah baik yang berbasis alam maupun sosial budaya untuk mengembangkan industri pertanian, perkebunan, industri massal, industri produk kreatif dan wisata sepanjang sejarah hampir 2 abad hingga kini. Keempat, kunci keberhasilan pembangunan kabupaten Bantul terletak pada sinergi antara fasilitasi dan perlindungan dari pemerintah daerah dengan gerak sejarah masyarakat kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul Berjalan dari masa ke masa mengikuti perkembangan sejarahnya bersama-sama dengan kondisi dinamika masyarakatnya. Proses sejarah tersebut sejalan dengan dinamika bangsa Indonesia. Melalui buku ini, diharapkan dapat memberikan hikmah dan makna atas kejadian sejarah masa lalu khususnya masyarakat Bantul untuk menjalani kehidupan yang lebih maju.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Taufik dan Surjomihardjo, Abdurrachman. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia.
- Benyamin, Jules R., 1991. *A Student's Guide to History*, New York: St. Martin's Press.
- Barnes, H.E., 1962. *A History of Historical Writing*. Dover Publications Ltd.
- Carey, Peter. 2017. *Takdir: Riwat Pangeran Diponegoro 1785-1855*. Jakarta: Gramedia.
- Gottchalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta: Penerbit UI
- Haryono, Anton. 2009. "Industri Pribumi Yogyakarta Masa Kolonial: 1830-1930". *Disertasi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Herabudin. 2015. *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Heyne. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Ibrahim Alfian, Teuku. ed., 1992. *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Jakarta: Grasindo.
- Margana, Sri *et al.*, 2013. *Praktek Persewaan Tanah Lungguh di Kesultanan Yogyakarta Pada Masa Sultan Hamengku Buwana VII Tahun 1877-1921*. Yogyakarta: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DI Yogyakarta.
- Munawaroh, Siti. 2016. *Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten Bantul pada masa kepemimpinan Sri Surya Widati tahun 2010-2015*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nasution. 1983. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Bandung: Jemmars.
- Poesponegoro *et al.*, Marwati Djoened. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanta *et al.*, 2015. *Direktori Bupati Bantul 1955-1985*. Bantul: Kantor Arsip Kabupaten Bantul.
- Purwanto, AET. 2011. "Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Kebijakan Romusha (1943-1945)". *Skripsi*, tidak diterbitkan Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.
- Renier, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, MC. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Yogyakarta: Serambi.



- Rouffaer, G. P. *Praja Kejawen (Vorstenlanden)*. terjemahan Suhardjo Hatmosuprobo, Yogyakarta: TanpaPenerbit.1988.
- Salim, M. Nazir, 2013. *Membayangkan Demokrasi, Menghadirkan Pesta: Pemilihan Umum Yogyakarta 1951*, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sanggar, Lengkong. 2017. “Pabrik Gula di Yogya Tidak Hanya PG Madukismo”. Unpublish.
- Santosa, Imam Budi. 2017. *Suta Naya Dhadhap Waru, Manusia Jawa dan Tumbuhan*. Yogyakarta: Interlude.
- Santoso, Hery & Wijaya, Cuk Ananta. “Kritik atas Eksplanasi Deduktif-Nomologis dalam Ilmu Sejarah”, Dalam *Jurnal Filsafat*, April 2003, Jilid 33 No. 1. Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sanoesi, Oemar. *et al.*, 1981. *Api Segoroyoso*. Proyek Pemeliharaan Tempat-tempat Bersejarah, Dinas Sosial, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Schmadt & CH Ward, 2000. “Challenge and Response” dalam Jorgen Schmadt & CH Ward (ed). *Sustainable Development: The Challenge of Transition*. Melbourne: Cambridge University Press
- Sjamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suhartono. 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis, 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suryo, Djoko. 2003. *Sejarah Bantul Dari Desa Ke Kabupaten*. Bantul: Bappeda
- _____. 2005. *Penduduk Dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900*. Yogyakarta: Ombak.
- Suryo *et al.*, Djoko. 2007. *Menelurusi Kembali Hari Jadi Kabupaten Bantul*. Bantul: Bappeda.
- Reivich, K & Shatte, A. 2002. *The Resilience Factor; 7 Essential Skill For Overcoming Life's Inevitable Obstacle*. New York, Broadway Books
- Thompson, Paul. 2012. *Suara dari Masa Silam: Teori dan Metode Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Penulis. 1994. *Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*. Yogyakarta: Kanisius.
- Toynbee, Arnold J. 1987. *A Study of History: A Bridgement of Volume I-VI*. Oxford University Press.
- Widiyanto. 1999. “Aspek Legal Formal Tanah Lungguh di Kasultanan Yogyakarta 1831-1918”. *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Yudokarsono, M., Suropto Harsah, ed., 2001. *Kumpulan Sejarah Hari Jadi Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, Yayasan Karya Bhakti Sosial.

WAWANCARA

- Wawancara Djoko Suryo Oktober 2019
 Wawancara Wardoyo November 2019
 Wawancara Suryanto November 2019

Wawancara Kamari November 2019

Wawancara Teguh November 2019

ARSIP

Babad Demak 1914

Babad Rônggawarsita tahun 1931

Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie. Batavia: Lands-Drukkerij. 1871

Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie. Batavia: Lands-Drukkerij. 1891

Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie. Batavia: Lands-Drukkerij. 1895

Regerings-Almanak voor Nederlandsch Indie. Batavia: Lands-Drukkerij. 1911

Serat Centhini yang ditulis tahun 1814-1823.

Wirya Adikuswanda. 1955. *Serat Nayaka Lélana*.

KAMUS

Anonim. 1974. Javanese-English Dictionary.

Horne, Elinor Clark. 1974. *Javanese-English Dictionary*. Yale University Press.

Padmasusastra. 1898. *Bauwarna*.

Padmasusastra. 1903. *Bausastra: Jarwa Kawi*.

Poerwadarminta 1939. *Bausastra Jawa*.

Poerwadarminta 1939. *Bausastra Indonesia-Jawi*.

Poerwadarminta. 1943. *Kawi-Jarwa*.

Winters, Door C. F. Sr. 1928. *Kawi-Javaansch Woordenboek*

MAJALAH

Majalah *Kajawèn* edisi Januari 1928. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Kajawèn* edisi November 1928. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Kajawèn* edisi Desember 1935. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Kajawèn* edisi Januari 1937. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Kajawèn* edisi Maret 1937. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Kajawèn* edisi Maret 1939. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Kajawèn* edisi Agustus 1939. Jakarta: Balai Pustaka

Majalah *Waradarma* tahun 1916

Majalah *Narpawandawa* tahun 1929

KORAN

De Indische Courant 24 Maret 1930

Het Nieuws van den dag voor nedh-indie, 30 Agustus 1939

Bataviaasch Nieuwsblad 20 Oktober 1904

De Indische courant 30 Agustus 1939

STATISTIK

BPS Kabupaten Bantul tahun 1981



BPS Kabupaten Bantul tahun 1991
 BPS Kabupaten Bantul tahun 2001
 BPS Kabupaten Bantul tahun 2001
 BPS Kabupaten Bantul tahun 2016
 BPS Kabupaten Bantul tahun 2017
 BPS Kabupaten Bantul tahun 2018
 BPS Kecamatan Dlingo dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Jetis dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Pundong dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Srandakan dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Kretek dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Pandak dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Sanden dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Pajangan dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Imogiri dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Piyungan dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Pleret dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Kasihan dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Sewon dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Banguntapan dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Sedayu dalam angka, 2018
 BPS Kecamatan Bambanglipuro dalam angka, 2018

PRODUK PERATURAN

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 1958
 Undang-Undang No. 15 Tahun 1950
 Undang-Undang No. 1 Tahun 1957
 Undang-Undang Darurat NO. 5 Tahun 1957

WEBSITE

<https://bantulkab.go.id/profil/sejarah.html>
<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/836/profil-kabupaten-bantul>
<https://larembantul.wordpress.com/2013/05/28/sejarah-kabupaten-bantul/>
<http://sejarahbantul.blogspot.com/2016/07/asal-usul-bantul.html>
<http://dpad.jogjaprovo.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-kabupaten-bantul-1487>
<https://budayajawa.id/asal-usul-bantul/>
<http://ridhwandaner.blogspot.com/2014/11/sejarah-bantul-pola-pertumbuhan.html>





consultant
Madani Callysta Saibuyun
Trust, Quality, and Satisfaction